

**STRATEGI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN KAWASAN
MINAPOLITAN DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

TESIS

Oleh
DZULFIANA MEITASUCI
NPM 2220051009



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
2026**

**STRATEGI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN KAWASAN
MINAPOLITAN DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Oleh

DZULFIANA MEITASUCI

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
Pada**

**Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

STRATEGI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

ABSTRAK

OLEH

DZULFIANA MEITASUCI

Pengembangan kawasan minapolitan merupakan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan RTRW Lampung Selatan ditetapkan Kecamatan Ketapang sebagai kawasan minapolitan perikanan, tetapi pelaksanaannya masih menghadapi beberapa kendala seperti akses permodalan yang masih terbatas, lemahnya kelembagaan pada nelayan, dan pengolahan hasil perikanan yang belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi eksisting, mengevaluasi tingkat keberlanjutan dan merumuskan strategi pengembangan berkelanjutan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan menggunakan analisis *Multidimension Scaling* (MDS) dengan alat analisis menggunakan *Rapfish* untuk mengukur tingkat keberlanjutan berdasarkan lima dimensi yaitu ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur serta kelembagaan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pengembangan yang berkelanjutan pada kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, namun masih terkendala oleh keterbatasan akses permodalan, teknologi penangkapan, sarana prasarana, dan kelembagaan. Nilai indeks keberlanjutan menunjukkan bahwa dimensi ekologi (38,33), ekonomi (32,88), sosial (37,84), dan kelembagaan (37,30) termasuk pada kategori kurang berkelanjutan. Dimensi teknologi dan infrastruktur (52,13) termasuk dalam kategori cukup berkelanjutan. Faktor sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan meliputi eksploitasi sumber daya ikan, tren hasil tangkapan, lokasi penangkapan, akses permodalan, teknologi penangkapan, dan kelompok nelayan. Strategi pengembangan diarahkan pada penguatan ekonomi dan kelembagaan pelaku usaha perikanan, pengembangan teknologi, infrastruktur dan pengolahan hasil perikanan serta pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan

Kata kunci : Keberlanjutan, Minapolitan, Pengembangan Kawasan,
Multidimensional Scaling (MDS), SWOT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT STRATEGY OF THE MINAPOLITAN AREA IN KETAPANG DISTRICT, SOUTH LAMPUNG REGENCY

ABSTRACT

BY

DZULFIANA MEITASUCI

The development of a 'minapolitan' zone is a fisheries-based regional development initiative aimed at improving the welfare of coastal communities and supporting sustainable development. Under the South Lampung RTRW, Ketapang Sub-district has been designated as a fisheries minapolitan zone; however, its implementation continues to face several challenges, such as limited access to capital, weak institutional capacity among fishermen, and suboptimal processing of fishery products. This study aims to analyse the existing conditions, evaluate the level of sustainability, and formulate strategies for the sustainable development of the fisheries-based urban area in Ketapang Sub-district, South Lampung Regency. The methods used in this study were observation and interviews, employing Multidimensional Scaling (MDS) analysis with the Rapfish tool to measure the level of sustainability based on five dimensions: ecology, economy, society, technology and infrastructure, and institutional capacity. SWOT analysis was used to formulate sustainable development strategies for the fisheries-based urban area in Ketapang Sub-district, South Lampung Regency. The research findings indicate that the region possesses significant fisheries resource potential, but is still hampered by limited access to capital, fishing technology, infrastructure and institutional support. The sustainability index values indicate that the ecological (38.33), economic (32.88), social (37.84), and institutional (37.30) dimensions fall into the 'less sustainable' category. The technology and infrastructure dimension (52.13) falls into the moderately sustainable category. Sensitive factors influencing sustainability include the exploitation of fish resources, catch trends, fishing locations, access to capital, fishing technology, and fishing communities. Development strategies are directed towards strengthening the economic and institutional capacity of fisheries businesses, developing technology, infrastructure and fisheries product processing, as well as the sustainable management of fisheries resources

Keywords: *Sustainability, Minapolitan, Sustainable Development, Multidimensional Scaling (MDS), SWOT Analysis.*

Judul Tesis : **STRATEGI PENGEMBANGAN
BERKELANJUTAN KAWASAN
MINAPOLITAN DI KECAMATAN
KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN**

Nama Mahasiswa : Dzulfiana Meitasuci

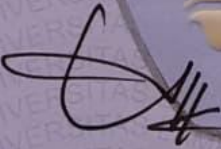
Nomor Pokok Mahasiswa : 2220051009

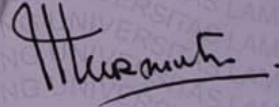
Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Program Pascasarjana Multidisiplin

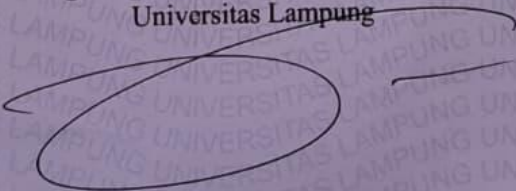


1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 196108261987021001


Prof. Dr. Ir. Ktut Muniarti., M.T.A.
NIP 196211201988032002

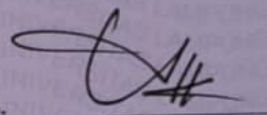
2. Kordinator Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Lampung


Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP 196407241989021002

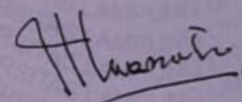
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

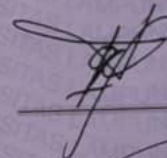
Ketua : Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.



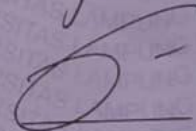
Sekretaris : Prof. Dr. Ir. Ktut Muniarti, M.T.A



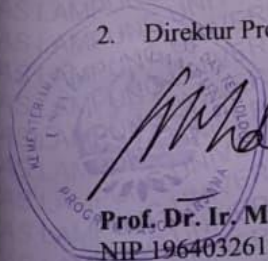
Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S



Anggota : Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.



2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 13 Juni 2026

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**STRATEGI PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN KAWASAN MINAPOLITAN DI KECAMATAN KETAPANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarisme*,
2. Hak intelektual atas karya saya ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 13 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



Dzulfiana Meitasuci
NPM 2220051009

MOTTO

فَسْتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوِضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ
بِالْعِبَادِ

*“Dan Aku Menyerahkan Urusanku Kepada Allah”
(Q.S. Al-Gahfir : 44)*

RIWAYAT HIDUP

Segala puji hanya milik Allah SWT, penulis dilahirkan di Kotabumi, 10 Mei 1993. Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Almarhum Hi. Poniman dan Ibu Hj. Siti Purwaningsih.

Penulis menyelesaikan studi pendidikan dasar di SD Islam Ibnu Rusyd Kotabumi pada tahun 2004 dan pendidikan menengah pertama diselesaikan pada tahun 2007 di MTs Husnul Khatimah, Kuningan, Jawa Barat. Pendidikan menengah atas di MA Husnul Khstimah, Kuningan, Jawa Barat diselesaikan pada tahun 2010. Penulis menyelesaikan masa studi sarjana di Program Studi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Purwokerto pada tahun 2018. Selanjutnya, penulis melanjutkan studi magister di Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Pascasarjana, Universitas Lampung pada Tahun 2022. Saat ini dapat dihubungi pada email : deemwork105@gmail.com

PERSEMBAHAN

Untuk Almarhum Ayahanda dan Ibunda Tersayang, yang selalu percaya bahwa pendidikan adalah warisan terbaik. Terimakasih atas setiap doa, pengorbanan, dan kasih sayang yang tak terhitung nilainya

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamuallaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin, Penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena hanya dengan rahmat dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Tesis yang Penulis selesaikan berjudul “Strategi Pengembangan Berkelanjutan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan”. Tesis yang Penulis tidak dapat menjadi sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dapat diberikan kepada sebagai proses pembelajaran di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si., sebagai Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Prof. Dr. Ir. M. Irfan Affandi, M.Si., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Perencanaan Wilayah dan Kota dan sekaligus Dosen Pembahas 2 yang memberikan doa, semangat, motivasi, ketulusan hati, kesabaran, ilmu, materi, bimbingan, nasihat, arahan, saran, ketelatenan, dan semua kebaikan yang telah diberikan kepada Penulis dalam penyelesaian tesis.
4. Prof. Dr.Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S., selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan inspirasi, ilmu, waktu dan perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Prof. Dr. Ir. Ktut Muniarti, M.T.A., selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan doa, dorongan, motivasi, pengarahan, bimbingan dan bantuan selama proses penyusunan tesis ini.
6. Dr. Ir. Dwi Haryono, M.S. selaku Pembahas 1 yang telah memberikan banyak ilmu, doa, motivasi, saran dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
7. Segenap dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota pada Pascasarjana Universitas Lampung yang memberikan inspirasi, ilmu dan motivasi kepada penulis, serta staf/karyawan yang memberikan banyak membantu dalam proses belajar.
8. Kedua orang tua, Almarhum Bapak Hi. Poniman dan Ibu Hj. Siti Purwaningsih atas dukungan, doa restu dan perhatiannya tidak pernah terhenti, serta keluarga besar atas semua doa dan perhatian yang diberikan kepada penulis selama ini.
9. Kepada adikku, Robi Agustian Prabowo yang telah memotivasi Penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Teman-teman tersayang yang selalu ada dari awal hingga detik detik terakhir Saskia, Ida, Fitri, Syifa dan Mbak Nanda, Panji dan Bang Viktor yang sudah memberikan semangat dan motivasi kepada Penulis dalam menjalankan masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan tesis.
11. Sahabat terbaik seperjuangan Magister Perencanaan Wilayah dan Kota 2022 dalam menyelesaikan tesis Mba Rahmi, Nisya, Popy, Eko, Aken, Atha, Bang Asep, dan Andre atas semangat, dukungan, dan bantuan kepada Penulis selama menjalani masa kuliah dari awal hingga akhir.
12. Semua pihak yang tidak penulis sebutkan sebelumnya atas dukungan kepada penulis hingga tesis ini dapat terselesaikan.

Bandar Lampung, 13 Juni 2026

Dzulfiana Meitasuci

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	6
2.1 Tinjauan Pustaka	6
2.1.1 Konsep Pengembangan Berkelanjutan	12
2.1.2 Sustainable Development Goals (SDGs).....	15
2.1.3 Konsep dan Teori Pengembangan Wilayah.....	17
2.1.4 Kawasan Minapolitan	25
2.1.5 Indeks Keberlanjutan	36
2.1.6 Metode Analisis SWOT	40
2.1.7 Penelitian Terdahulu.....	42
2.2 Kerangka Pemikiran.....	49
III. METODELOGI PENELITIAN	52
3.1 Konsep Dasar dan Batasan Operasional.....	52
3.2. Metode Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	67
3.2.1 Sumber Data	67
3.2.2 Pengumpulan Data	68
3.2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian	68
3.3 Populasi dan Sampel	70
3.4 Metode Analisis Data.....	70
3.4.1 Metode Analisis untuk Tujuan Satu	72
3.4.2 Metode Analisis untuk Tujuan Dua dan Tiga.....	72

3.5	Analisis Monte Carlo	75
3.6	Analisis Lavarage.....	76
IV.	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	78
4.1	Letak Geografis dan Administrasi.....	78
4.2	Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Selatan	80
4.3	Kondisi Fisik Kabupaten Lampung Selatan.....	81
4.4	Kondisi Pesisir dan Sumber Daya Perikanan.....	83
4.5	Letak Geografis dan Administrasi Kecamatan Ketapang	85
4.6	Kondisi Demografi Kecamatan Ketapang.....	86
V.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	88
5.1	Kondisi Eksisting Kawasan Minapolitan Kecamatan Ketapang.....	88
5.2	Karakteristik Responden	
5.3	Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Minapolitan.....	100
5.3.1	Keberlanjutan Dimensi Ekologi Minapolitan	107
5.3.2	Keberlanjutan Dimensi Ekonomi Minapolitan	108
5.3.3	Keberlanjutan Dimensi Sosial Minapolitan	111
5.3.4	Keberlanjutan Dimensi Teknologi dan Sarana Infrastruktur	114
5.3.5	Keberlanjutan Dimensi Kelembagaan Minapolitan	117
5.4	Status Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Minapolitan	121
5.5	Strategi Kebijakan Pengembangan Kawasan Minapolitan Kecamatan Ketapang.....	129
5.5.1	Identifikasi Faktor Internal dan Faktor Eksternal Pengembanagan Kawasan Minapolitan	130
5.5.2	Matriks SWOT	137
5.5.3	Rancangan Strategi dan Program Keberlanjutan	141
VI.	KESIMPULAN DAN SARAN.....	150
6.1	Kesimpulan.....	150
6.2	Saran.....	151
	DAFTAR PUSTAKA.....	152
	LAMPIRAN.....	155

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1 Penelitian Terdahu.....	43
2 Jumlah Sebaran Responden Penelitian	71
3 Kategori Status Keberlanjutan Berdasarkan Nilai Indeks Keberlanjutan	73
4 Luas Wilayah, Jumlah Pulau dan Jumlah Desa.....	74
5 Tinggi Wilayah Kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.....	80
6 Potensi Sumber Daya Perikanan Kabupaten Lampung Selatan.....	86
7 Total Produksi Perikanan Berdasarkan Tempat Penangkapan Ikan	87
8 Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan Ketapang.....	89
9 Data Produksi Perikanan Tangkap Kecamatan Ketapang.....	89
10 Daftar TPI dan PPI di Kabupaten Lampung Selatan.....	95
11 Kalender Musim Penangkapan Ikan di Kecamatan Ketapang	96
12 Indeks Keberlanjutan.....	101
13 Hasil Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Minapolitan	101
14 Atribut Sensitif Dimensi Ekologi	105
15 Atribut Sensitif Dimensi Ekonomi.....	108
16 Atribut Sensitif Dimensi Sosial.....	111
17 Atribut Sensitif Dimensi Teknologi dan Infrastruktur	113
18 Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan.....	117
19 Atribut Sensitif pada setiap Dimensi Keberlanjutan	122
20 Selesih Nilai MDS dan Monte Carlo.....	126
21 Faktor Internal dan Eksternal Pengembangan Kawasan	131
22 Hasil Matriks SWOT Pengembangan Keberlanjutan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ketapang.....	139
23 Matriks IFAS dan EFAS	138
24 Strategi dan Program.....	146

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1	Kerangka Pemikiran Penelitian Analisis Keberlanjutan	51
2	Alur Tahapan Kegiatan untuk Penentuan Indeks Keberlanjutan	72
3	Ilustrasi Indeks Keberlanjutan.....	74
4	Ilustrasi Kite Diagram Indeks Keberlanjutan.....	77
5	Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	79
6	Peta Lokasi Penelitian Kawasan Minapolitan Lampung Selatan.....	93
7	Peta Sebaran Lokasi Keberlanjutan.....	103
8	Atribut Sensitif Dimensi Ekologi.....	104
9	Atribut Sensitif Dimensi Ekonomi.....	107
10	Atribut Sensitif Dimensi Sosial.....	111
11	Atribut Sensitif Dimensi Teknologi dan Infrastruktur	114
12	Atribut Sensitif Dimensi Kelembagaan.....	117
13	Diagram Layang Status Keberlanjutan	123
14	Kuadran Strategi Pengembangan Kawasan.....	142

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan laut yang luas memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar sehingga sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan dalam mendukung pembangunan wilayah pesisir dan perekonomian nasional. Tetapi kekayaan alam yang melimpah jika tidak dikelola secara berkelanjutan dan tidak diintegrasikan dengan kebijakan yang efektif maka akan memicu hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lingkungan, dan menurunnya kesejahteraan hidup masyarakat pesisir (Pramudya, 2025). Keberlanjutan sektor perikanan perlu didukung melalui pendekatan pengembangan wilayah agar pemanfaatan sumber daya perikanan dapat memberikan manfaat dan dapat berkontribusi terhadap kegiatan ekonomi (Atifa, 2024)

Dalam pengembangan wilayah pesisir dan kelautan, pendekatan *blue economy* berperan sebagai paradigma dalam pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, sekaligus menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan kawasan kelautan dan perikanan. *Blue Economy* sebagai konsep baru pembangunan kelautan dan perikanan yang didasarkan pada pembangunan ekonomi yang berimbang antara pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pengelolaan lingkungan yang optimal dan berkelanjutan

untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di negara berkembang (Kaunang,2025).\

Pendekatan *blue economy* bertujuan untuk menjaga ekosistem laut tetap terjaga dan menciptakan peluang investasi, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat nasional yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Penerapan konsep *blue economy* di sektor perikanan diimplementasikan melalui berbagai kebijakan pengembangan wilayah yang berfokus pada sektor perikanan salah satunya yaitu pengembangan kawasan Minapolitan (Darajati, 2024). Dalam sektor perikanan, pendekatan ini menjadi penting mengingat tingginya tekanan terhadap sumber daya ikan akibat eksploitasi berlebih, perubahan iklim, serta keterbatasan kapasitas masyarakat pesisir dalam mengelola sumber daya secara berkelanjutan.

Berdasarkan Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2013, program minapolitan dilaksanakan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah dengan kegiatan perikanan sebagai kegiatan utama, dan meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat pedesaan (Rohaya, 2020). Program minapolitan merupakan program kegiatan perikanan yang menggabungkan kegiatan produksi bahan baku, pengolahan, dan melakukan pemasaran dalam satu rangkaian kegiatan besar dalam satu aktivitas kegiatan yang besar dalam satu kawasan atau wilayah yang terdiri dari sentra produksi, perdagangan, jasa, pemukiman dan kegiatan lainnya yang saling terkait (Darmawan, 2013).

Pengembangan kawasan minapolitan diarahkan pada pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran kepada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan. Pengembangan kawasan minapolitan harus mempunyai dasar kelestarian fungsi lingkungan kawasan sehingga manfaat pengembangan yang dapat dinikmati untuk generasi sekarang maupun yang akan datang (Mohamad, 2024).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2023 – 2043 Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan menjadi kawasan minapolitan karena memiliki keunggulan pada perikanan tangkap yang didukung oleh akses pelabuhan serta jaringan transportasi sehingga mampu menjadi pusat kegiatan perikanan dari hulu hingga hilir dan peran strategisnya dalam mendukung ketahanan pangan dan perekonomian berbasis perikanan di Provinsi Lampung. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 – 2031 kawasan minapolitan dipusatkan di Kecamatan Ketapang yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Lokal promosi (PKLp). Kawasan ini ditetapkan sebagai daerah penyuplai komoditas perikanan dan diharapkan dapat berkembang menjadi pusat pengolahan, penyimpanan dan distribusi hasil perikanan.

Penetapan Kecamatan Ketapang sebagai pusat pengembangan kawasan minapolitan sejak tahun 2013 mengindikasikan adanya komitmen pemerintah dalam mendorong pembangunan pada sektor perikanan, Tetapi hingga saat ini masih ditemukan berbagai permasalahan dalam pengembangan kawasan tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan masih belum tercapai secara optimal (Cahya, 2013). Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang sebagai pusat kawasan minapolitan Kabupaten Lampung Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan seperti : keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas yang belum optimal, teknologi yang masih semi tradisional, pengolahan hasil perikanan rendah, lemahnya kelembagaan pada nelayan, dan akses terhadap permodalan (Gumelar, 2024).

Keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh aspek ekologi, sosial, teknologi dan infrastruktur, serta kelembagaan. Apabila pengelolaan kawasan hanya berfokus pada peningkatan produksi tanpa

memperhatikan kondisi ekosistem, maka hal tersebut akan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang dapat mengancam keberlangsungan usaha perikanan di masa depan. Perubahan cuaca, tekanan terhadap sumber daya ikan, dan ketergantungan masyarakat terhadap sektor perikanan masih menjadi tantangan yang dapat mempengaruhi keberlanjutan kawasan minapolitan untuk jangka panjang. Dari aspek sosial rendahnya keterlibatan masyarakat, pemberdayaan dan kelembagaan dapat menghambat pencapaian tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas dan infrastruktur yang belum optimal dapat menjadi kendala dalam kegiatan distribusi dan hasil perikanan.

Kajian mengenai tingkat keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang yang dilakukan secara multidimensi masih belum banyak dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gumelar (2024) strategi pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Tanggamus menggunakan analisis SWOT, QSPM, dan AHP. Penelitian ini tetapi belum mengevaluasi tingkat keberlanjutan kawasan minapolitan secara multidimensi. Penelitian ini membahas mengenai kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan masih sangat terbatas. Oleh karena itu perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai kondisi keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang dengan menggunakan pendekatan *Multidimensional Scaling* (MDS) untuk mengidentifikasi tingkat keberlanjutan kawasan dan faktor-faktor sensitif yang mempengaruhinya sebagai dasar dalam perumusan strategi pengembangan kawasan. Hasil analisis selanjutnya digunakan sebagai dasar perumusan strategi pengembangan melalui analisis SWOT sehingga menghasilkan arahan pengembangan kawasan minapolitan yang lebih tepat.

Berdasarkan permasalahan dan keterbatasan kajian yang sudah diuraikan, diperlukan evaluasi terhadap keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Evaluasi ini

dilakukan untuk mengetahui tingkat keberlanjutan kawasan pada aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur serta kelembagaan sebagai dasar dalam penyusunan strategi pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang ditelaah diuraikan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi eksisting kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?
2. Bagaimana tingkat keberlanjutan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari aspek ekonomi, ekologi, sosial, teknologi dan infrastruktur dan kelembagaan?
3. Bagaimana strategi pengembangan berkelanjutan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut :

1. Menganalisis kondisi eksisting kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan
2. Mengevaluasi tingkat keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan ditinjau dari aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur, dan kelembagaan
3. Merumuskan strategi pengembangan keberlanjutan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian perencanaan wilayah, pembangunan berkelanjutan, dan tata ruang berbasis perikanan.
- b. Menambah literatur akademik terkait konsep minapolitan dan implementasinya dalam konteks daerah pesisir di Indonesia.
- c. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian pembangunan wilayah pesisir yang berkelanjutan melalui evaluasi keberlanjutan kawasan minapolitan sebagai pendekatan pengembangan wilayah berbasis sektor perikanan

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam merumuskan kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan minapolitan yang berkelanjutan berdasarkan kondisi dan tingkat keberlanjutan kawasan
- b. Menyediakan rekomendasi strategi pengembangan bagi sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat rantai nilai (hulu–hilir) sektor perikanan.
- c. Memberikan masukan kepada pelaku usaha perikanan dalam mengembangkan usaha yang berkelanjutan untuk meningkatkan pendapatan
- d. Memberikan informasi kepada masyarakat sebagai dasar dalam mengembangkan kegiatan perikanan yang produktif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep dan Syarat Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya manusia untuk memperbaiki kualitas kehidupan dengan cara untuk tidak merusak ekosistem pendukungnya. Pembangunan berkelanjutan terdiri dari tiga aspek yang menjadi pilar utama yaitu : ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hapsoro, 2020). Pembangunan berkelanjutan merupakan hasil dari kesepakatan global pada KTT Bumi atau Konferensi Rio yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa di Rio de Janeiro, Brasil. Menurut Keiner (2001) definisi pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan berkelanjutan berarti memastikan kondisi hidup yang bermartabat dan berkaitan dengan hak asasi manusia dengan menciptakan serta mempertahankan jangkauan atau alternatif akses yang luas dalam merencanakan pola hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Pembangunan berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang di dalamnya, seluruh aktivitas seperti eksploitasi sumberdaya, arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan berada dalam keadaan

yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Akhmad, 2014).

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan berwawasan jangka panjang, yang meliputi jangka waktu antar generasi dan berupaya menyediakan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat sehingga dapat mendukung kehidupan. Kemunculan konsep ini berkaitan erat dengan kesadaran tentang tatanan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, dengan inti pada kepentingan ekonomi (Hapsoro, 2020). Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menghubungkan antara pembangunan ekonomi, kualitas lingkungan dan kesetaraan sosial. Menurut Mohan Munasinghe (1993) dalam Rogers, et. al (2008) dalam Pertiwi (2017) terdapat tiga pilar dari pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Ekonomi, yaitu memaksimalkan pendapatan dengan mempertahankan atau meningkatkan cadangan kapital.
2. Ekologi, yaitu menjaga dan mempetahankan sistim fisik dan biologis.
3. Sosial budaya, yaitu menjaga stabilitas dari sistem sosial dan budaya.

Dalam dimensi ekonomi terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara lain upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memerangi kemiskinan, serta mengubah produksi dan konsumsi ke arah yang seimbang. Sedangkan dimensi sosial berhubungan dengan pemecahan masalah kependudukan, perbaikan pelayanan masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, dan lain-lain. Adapun dimensi lingkungan memiliki tujuan-tujuan antara lain upaya pengurangan dan pencegahan terhadap polusi, pengelolaan limbah serta konservasi/preservasi sumber daya alam.

Dengan demikian tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada ketiga dimensi di atas yaitu keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*) serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*).

Dalam pengembangan kawasan industry, pemerintah dan pihak investor tidak hanya mengedepankan pertimbangan keuntungan ekonomi, namun juga harus dapat memprediksi dampak kerusakan ekologi yang akan terjadi seperti menurunnya kualitas air bersih dan keanekaragaman hayati. Demikian pula pada aspek sosial, harus dipertimbangkan bahwa pembangunan kawasan tersebut tidak merusak tatanan sosial yang baik atau dapat menimbulkan konflik sosial. Perkembangan konsep pembangunan berkelanjutan adalah pada dimensi kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa dimensi sosial budaya terbagi atas modal sumber daya manusia dan kelembagaan. Suatu sistem atau organisasi yang bertanggungjawab pada kegiatan pembangunan harus mampu mengelola sumber daya manusia secara efektif. Hal ini hanya dapat dicapai dengan adanya kelembagaan.

Konsep tentang pembangunan berkelanjutan terbagi atas dua bagian yaitu apa yang harus dilestarikan dan apa yang harus dibangun. Adapun bagian yang harus dijaga adalah

1. Alam yang meliputi : bumi, biodiversitas dan ekosistem
2. Life support yang meliputi : ekosisten, sumber daya dan lingkungan
3. Community yang meliputi : budaya, kelompok dan tempat.

Sedang bagian yang harus dibangun adalah :

1. Manusia yang ditujukan pada kehidupan anak-anak, harapan hidup, pendidikan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama.
2. Ekonomi yang ditujukan pada kesejahteraan, produktifitas dan konsumsi,
3. Sosial yang ditujukan pada institusi, modal sosial, kawasan lokal dan regional

(Suparmoko, 2020)

Terdapat lima konsep *Sustainable Development* yaitu : populasi, sumber daya manusia, ketahanan pangan, energi, industri dan pertumbuhan kota.

a. Populasi dan Sumber Daya Manusia

Jumlah populasi yang meningkat menuntut peningkatan areal perumahan dan infrastrukturnya. Jumlah populasi yang besar juga menjadi potensi meluasnya kemiskinan serta keterbatasan akses terhadap sumber daya. Sebagai upaya keberlanjutan, maka pemerintah perlu untuk melakukan upaya jangka panjang untuk memperkuat sosial, budaya dan motivasi ekonomi untuk keluarga berencana dan untuk memberikan kepada semua orang akses yang sama dalam memperoleh pendidikan dan layanan lainnya. Pembangunan berkelanjutan juga mendorong pengembangan sumber daya manusia. Tujuan dari upaya ini tidak hanya untuk membangun pengetahuan teknis dan kemampuan, tetapi juga untuk menciptakan nilai – nilai baru yang mendukung perubahan sosial. Perubahan tersebut diharapkan dapat menciptakan kesadaran manusia dalam berbagi sumber daya global secara adil.

b. Food Security (Ketahanan Pangan)

Pada negara maju, ketersediaan pangan dijamin oleh pemerintah dan dilindungi dari persaingan internasional. Pemerintah memberi subsidi pada petani dengan penyediaan tanah, sumber daya air dan bahan kimia serta dukungan teknologi. Akibatnya, terjadi surplus bahan pangan dan disalurkan pada negara berkembang. Namun demikian, hal ini terkadang berdampak pada kebijakan pertanian negara penerima. Pada negara berkembang, pemerintah memberi perhatian terhadap petani. Peningkatan teknologi, insentif harga pupuk dan pelayanan pemerintah telah menghasilkan terobosan besar dalam produksi pangan. Namun demikian di beberapa wilayah, teknologi pertanian sering tidak memadai dan tidak disiapkan insentif ekonomi. Kondisi ekosistem yang tidak diperhatikan sehingga hutan semakin gundul dan lahan kering yang produktif dibiarkan tandus. Akibatnya sistem produksi pangan juga terganggu akibat praktek pertanian yang kurang berkelanjutan. Ketahanan pangan juga memerlukan perhatian pada pola distribusi. Jalur distribusi bahan pangan menyebabkan harganya meningkat. Kelaparan pada masyarakat sering terjadi

akibat kurangnya daya beli bukan karena kurangnya makanan yang tersedia. Dengan demikian, kebijakan pembangunan berkelanjutan mendorong semua negara untuk memperbaiki pola pertanian, sistem produksi pangan dan pola distribusi.

c. Ekosistem sebagai Sumber Daya pembangunan

Ancaman kepunahan spesies terjadi akibat keinginan manusia dan kondisi alam. Keragaman spesies diperlukan untuk keberlanjutan fungsi ekosistem dan biosfer secara keseluruhan. Berbagai spesies liar diperlukan sebagai bahan dasar obat-obatan dan bahan baku industri. Namun demikian, konservasi harus tetap dilakukan dengan pertimbangan moral, etika, budaya, estetika, dan ilmiah. Kebijakan pemerintah dalam mempertahankan spesies serta kualitas ekosistem yaitu sebagai cadangan sumber daya alam. Pemerintah juga hendaknya membatasi pemanfaatan hutan tropis dan waduk sehingga keanekaragaman hayati dapat dipertahankan. Pemanfaatan sumber daya hutan dan air tidak hanya mengedepankan pertimbangan ekonomi tetapi juga untuk kepentingan kualitas alam.

d. Energi

Distribusi energi yang aman dan berkelanjutan sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan, namun hal tersebut sangat sulit untuk diadakan. Penggunaan energi untuk industri, pembangunan pertanian dan kebutuhan populasi juga semakin besar. Peningkatan jumlah penduduk serta industrialisasi membutuhkan peningkatan ketersediaan energi yang lebih besar pula. Pemerintah harus mampu membuat kebijakan efisiensi energi untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Peralatan modern dapat dirancang untuk memberikan jumlah energi yang sama dengan layanan hanya dua pertiga atau bahkan satu-setengah dari input energi primer yang dibutuhkan untuk menjalankan peralatan tradisional. Pada beberapa negara maju menggunakan energi nuklir, namun menjadi

kontroversi yang tajam akan tingkat keamanannya. Prioritas tertinggi yang harus diberikan adalah kajian pengembangan alternatif energi yang ramah lingkungan dan ekologis.

e. Industri

Pertumbuhan penduduk mendorong meningkatnya konsumsi barang-barang manufaktur sehingga industrialisasi dapat berkembang. Pengalaman di negara-negara industri membuktikan bahwa teknologi anti-polusi menghemat biaya dalam hal kesehatan, properti, dan kerusakan lingkungan. Pertumbuhan industri dengan produktivitas yang lebih tinggi, peningkatan efisiensi, dan penurunan polusi, juga dituntut untuk mampu mengantisipasi resiko bahan kimia beracun serta limbahnya. Peningkatan kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa yang disediakan oleh industri, harus dapat mendukung pembangunan berkelanjutan atau tetap mempertimbangkan kualitas lingkungan, sosial dan masa depan ekologisnya (Pertiwi, 2017).

Menurut Effendi (2018) syarat pembangunan berkelanjutan adalah menekankan adanya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya, pengendalian limbah, serta menjaga daya dukung lingkungan dan agar pembangunan tidak merusak ekosistem yang menopang kehidupan.. Terdapat tiga batasan dalam syarat dalam pembangunan berkelanjutan yaitu :

1. Tingkat pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak boleh melebihi kemampuan regenerasinya
2. Tingkat pembuangan limbah tidak boleh melampaui kapasitas asimilasi lingkungan
3. Pemanfaatan sumber daya tak terbarukan harus disertai pengembangan alternatif sumber daya terbarukan yang memadai.

Pada tataran tata ruang, pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika kegiatan pembangunan ditempatkan sesuai perwilayahan yang benar secara ekologis. Penyusunan rencana tata ruang wajib mengintegrasikan asas berkelanjutan dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung

lingkungan. Hal ini bertujuan agar aktivitas pembangunan tidak melampaui kapasitas lingkungan dalam menyediakan kebutuhan dan menyerap dampak negatif. Konsep *carrying capacity* (daya dukung lingkungan) menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana suatu kawasan mampu menanggung beban pembangunan (Kultsum, 2023). Penilaian daya dukung ekologis perlu digunakan untuk mencegah terjadinya perubahan ekologis yang melebihi kapasitas alami. Tanpa evaluasi tersebut, pembangunan berpotensi menimbulkan degradasi lingkungan yang tidak dapat dipulihkan (Putri, 2024)

Menurut Warlina (2016) menjelaskan bahwa pembangunan berkelanjutan perlu mengintegrasikan aspek kualitas lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga aktivitas pembangunan dapat memberikan manfaat antar generasi tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian syarat utama pembangunan berkelanjutan terdapat dalam empat hal pokok, yaitu :

1. Menempatkan kegiatan pembangunan pada wilayah yang sesuai secara ekologis
2. Memastikan pemanfaatan sumber daya terbarukan tidak melebihi kapasitas regenerasi
3. Mengendalikan limbah agar tidak melampaui kapasitas asimilasi lingkungan,
4. Memastikan perubahan ekologis tetap berada dalam batas daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2.1.2 Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) dibentuk berdasarkan lintasan historis yang telah dirintis oleh negara-negara dan PBB, termasuk *The Economic and Social Council* (ECOSOC) yang merupakan salah satu organisasi bagian dari PBB. Agenda SDGs berisi 17 Tujuan/ Goals yang tersebar ke dalam empat pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu Pilar Pembangunan Sosial, Pilar Pembangunan Ekonomi, Pilar Pembangunan Lingkungan, serta Pilar Hukum dan Tata Kelola. 17 SDGs tersebut adalah sebagai berikut: *Sustainable*

Development Goals (SDGs) mencakup 3 pilar pembangunan berkelanjutan yaitu social, lingkungan dan ekonomi. Azas yang dianut dalam implementasinya adalah inklusif dan transparan, yaitu terdapat keterbukaan antar pemerintah dan semua pemangku kepentingan dengan maksud untuk mengembangkan tujuan pembangunan berkelanjutan global yang akan disepakati oleh PBB (BPK, 2020). Berdasarkan laporan ICSU (2015) bahwa *Sustainable Development Goals* mencakup 17 tujuan yaitu :

1. Pengentasan kemiskinan di seluruh dunia
2. Peningkatan ketahanan pangan dan peningkatan gizi, serta upaya promosi pertanian berkelanjutan
3. Peningkatan promosi hidup sehat dan kesejahteraan masyarakat.
4. Peningkatan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan serta upaya promosi kesempatan belajar seumur hidup.
5. Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
6. Ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan.
7. Tercapainya energi yang handal yang didukung dengan akses yang berkelanjutan serta terjangkau bagi seluruh masyarakat
8. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, kesempatan kerja dan produktifitas serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Infrastruktur yang handal dan mendorong inovasi pada industri yang berkelanjutan
10. Ketimpangan antar negara yang semakin kecil.
11. Tercapainya kota dan pemukiman yang aman dan berkelanjutan
12. Pola produksi dan konsumsi kebutuhan masyarakat yang berkelanjutan.
13. Upaya praktis untuk mereduksi dampak perubahan iklim.
14. Pelestarian sumber daya kelautan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
15. Perlindungan ekosistem darat, pengelolaan hutan yang berkelanjutan, pencegahan penggurunan, pencegahan degradasi lahan dan perlindungan keanekaragaman hayati

16. Penciptaan masyarakat yang damai untuk pembangunan berkelanjutan, penyediaan akses yang efektif dan akuntabel bagi semua masyarakat.
17. Peningkatan sarana dan kemitraan yang mendukung pembangunan berkelanjutan

Secara rinci program *Sustainable development goals* terbagi atas enam komponen yaitu :

1. Planet atau perlindungan ekosistem untuk seluruh masyarakat
2. People atau adanya jaminan hidup sehat, pendidikan serta inklusi wanita dan anak anak
3. Dignity atau memberantas kemiskinan dan ketidakadilan
4. Property atau membangun kemandirian dan transformasi energi
5. Keadilan atau mempromosikan lingkungan yang aman dan damai yang didukung dengan kelembagaan yang kuat
6. Partnership atau mengkatalisasi solidaritas global yang mendukung pembangunan berkelanjutan (Pertiwi, 2017)

Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) SDGs Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan agar pelaksanaan dan pencapaian SDGs dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, baik pemerintah tingkat nasional maupun daerah, serta kelompok-kelompok masyarakat, antara lain akademisi dan pakar, filantropi dan pelaku usaha, serta organisasi masyarakat sipil dan media. Pemerintah telah melaksanakan beberapa amanat dalam Perpres tersebut, antara lain :

1. Peta Jalan (Roadmap) Nasional Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, sebagai dokumen perencanaan yang memuat kebijakan strategis tahapan pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional hingga 2030 sesuai dengan sasaran pembangunan nasional
2. Melalui Peraturan Menteri PPN/ kepala Bappenas Nomor 7 tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2017-2029

3. Hingga tahun 2021 telah terbit 29 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.

2.1.3 Konsep dan Teori Pengembangan Wilayah Berbasis Sektor

Pengembangan wilayah berfokus pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, dan nilai tambah industri pengolahan. Selain definisi ekonomi, pengembangan wilayah mengacu pada pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya.

Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang, dalam hal ini pengembangan wilayah tidak berkaitan dengan eksploitasi wilayah. Pengembangan wilayah merupakan upaya memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal dan eksternal yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain

Tujuan pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik dan sebagainya. Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu

mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.

Dimensi ruang (spatial) memiliki arti yang penting dalam konteks pengembangan wilayah, karena ruang dapat menciptakan konflik dan pemicu kemajuan bagi individu dan masyarakat. Secara kuantitas ruang adalah terbatas dan secara kualitas ruang memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda-beda. Maka dari itu intervensi terhadap kekuatan pasar (planning) yang berwawasan keruangan memegang peranan yang sangat penting dalam formulasi kebijakan pengembangan wilayah. Sehingga keserasian berbagai kegiatan pembangunan sektor dan wilayah dapat diwujudkan, dengan memanfaatkan ruang dan sumber daya yang ada didalamnya guna mendukung kegiatan kehidupan masyarakat (Harmadi, 2011)

Teori pengembangan wilayah pada dasarnya menjelaskan bagaimana suatu kawasan dapat tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki serta keterkaitannya dengan wilayah lain. Teori pengembangan wilayah adalah kumpulan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu wilayah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan memperhatikan berbagai aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan institusi. Teori pengembangan wilayah memfokuskan diri pada tiga hal yaitu :

1. Kesejahteraan masyarakat dan wilayah, menekankan sumber daya lingkungan, dan wilayah
2. Menekankan sumber daya lingkungan dan faktor alam yang dianggap memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan sistem kegiatan produksi suatu wilayah
3. Fokus pada institusi dan proses pengambilan keputusan yang fokus pada tata kelola yang bertanggung jawab dan berkinerja baik.

Teori pengembangan wilayah klasik meliputi teori lokasi dan teori pusat pertumbuhan tetapi dalam perkembangan selanjutnya disebut juga teori agri-

urban yang tercipta karena adanya kekhawatiran alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Teori pengembangan wilayah pada dasarnya menjelaskan bagaimana suatu kawasan dapat tumbuh dan berkembang melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki serta keterkaitannya dengan wilayah lain. Teori pengembangan wilayah adalah kumpulan konsep yang menjelaskan bagaimana suatu wilayah mengalami pertumbuhan dan perkembangan dengan memperhatikan berbagai aspek fisik, ekonomi, sosial, budaya, dan institusi. Beberapa teori mengenai pengembangan wilayah antara lain :

1. **Teori Lokasi**

Teori Lokasi merupakan sebuah teori yang dikembangkan untuk memperhitungkan pola lokasi kegiatan – kegiatan ekonomi termasuk di dalamnya kegiatan industri dengan cara yang konsisten dan logis. Lokasi dalam ruang dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Lokasi Absolut merupakan lokasi yang berkenaan dengan posisi menurut koordinat garis lintang dan garis bujur / letak astronomis. Lokasi absolut disuatu tempat dapat diamati pada peta
- b. Lokasi relatif merupakan lokasi suatu tempat yang bersangkutan terhadap kondisi wilayah – wilayah lain yang ada disekitarnya.

Teori lokasi dapat didefinisikan sebagai ilmu yang menyelidiki mengenai tata ruang / spasial kegiatan ekonomu atau dapat juga diartikan sebagai ilmu mengenai lokasi secara geografis dari sumber daya yang langka dan hubungannya atau pengaruhnya terhadap lokasi dari berbagai macam usaha atau kegiatan lain. Secara umum pemilihan lokasi oleh suatu unit aktivitas dapat ditentukan oleh beberapa faktor seperti bahan baku lokal, permintaan lokal, bahan baku yang dapat dipindahkan dan permintaan luar

2. Teori Pusat Pertumbuhan

Pusat pertumbuhan (Growth Poles) dapat dijelaskan dengan dua cara yaitu : secara fungsional dan secara geografis. Secara fungsional pusat pertumbuhan sebagai pusat konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang karena sifat ketekaitannya memiliki unsur yang dinamis, sehingga mampu menggerakkan kehidupan ekonomi baik secara internal maupun eksternal. Secara geografis pusat pertumbuhan adalah tempat fasilitas yang nyaman dan menjadi daya tarik menarik semua jenis perusahaan untuk menetap dan orang suka datang dan memanfaatkan fasilitas yang ada di kota

Suatu kota diaktakan sebagai pusat pertumbuhan harus memiliki ciri – ciri sebagai berikut :

1. Adanya hubungan intern dari berbagai macam kegaitan hubungan internal yang sangat menentukan dinamika sebuah kota. Adanya keterkaitan antara sektor dengan sektor lainnya sehingga apabila ada satu sektor yang tumbuh akan mendorong pertumbuhan sektor lainnya, karena saling terkait. Dengan demikian kehidupan kota akan menciptakan sinergi untuk saling mendukung terciptanya pertumbuhan.
2. Adanya unsur pengganda keberadaan sektor – sektor yang saling terkait dan saling mendukung akan menciptakan efek pengganda. Bila ada permintaan satu sektor dari luar wilayah, peningkatan produksi sektor tersebut akan berpengaruh pada peningkatan sektor lain dari luar wilayah
3. Adanya konsentrasi geografis dari berbagai sektor atau fasilitas yang bisa menciptakan efisiensi di antara sektor sektor yang saling membutuhkan yang dapat menimbulkan daya atrik dari kota. Orang yang datang ke kota tersebut bisa mendapatkan berbagai kebutuhan pada lokasi yang berdekatan, jadi kebutuhan dapat diperoleh dengan lebih hematnya waktu, biaya, dan tenaga. Hal ini membuat kota tersebut menarik untuk dikunjungi dan karena volume transaksi yang makin meningkat akan menciptakan economic of scale sehingga terciptanya efisiensi lebih lanjut.

4. Bersifat mendorong pertumbuhan daerah yang ada dibelakangnya sepanjang terhdap hubungan yang harmonis di antara kota sebagi pusat pertumbuhan dengan kota dibelakangnya maka pertumbuhan kota pusat akan mendorong pertumbuhan kota dibelakangnya. Kota membutuhkan bahan baku dari wilayah yang ada dibelakangnya dan menyediakan berbagai fasilitas atau kebutuhan wilayah belakangnya untuk dapat mengembangkan diri.

Kota-kota besar berkembang sangat pesat dan berperan sebagai pusat yang menarik penduduk, modal, dan sumber daya dari wilayah sekitarnya yang relatif statis akibatnya daerah pinggiran perlahan ikut berkembang menjadi lebih dinamis. Namun, karena aliran sumber daya lebih banyak mengalir ke pusat, pertumbuhan ekonomi kota menjadi cepat dan kumulatif, sehingga kesenjangan pendapatan antara pusat dan pinggiran semakin melebar. Wilayah – wilayah pinggiran di sekitar pusat secara berangsur -angsur berkembang menjadi masyarakat yang dinamis. Aglomerasi adalah pengelompokan industri atau kegiatan di satu lokasi tertentu. Biasanya usaha komersial, industri, dan jasa terkonsentrasi di suatu tempat karena memberi banyak keuntungan, sehingga mendorong peningkatan investasi di lokasi tersebut.

3. Teori Agri-Urban

Agri-urban berasal dari kata “agro” (pertanian) dan “urban” (kota), sehingga dapat diartikan sebagai kota pertanian atau kota di wilayah lahan pertanian, kota tani berbasis pada budidaya pertanian, konservasi sumber daya alam, dan pengembangan potensi daerah dengan pendekatan berwawasan lingkungan untuk menghindari kesalahan pembangunan masa lalu. Pendekatan ini bertujuan mendorong kemandirian desa dengan memanfaatkan potensi lokal dan mengurangi ketergantungan pada ekonomi perkotaan. Konsep agri-urban relevan diterapkan di pedesaan karena mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, serta dianggap mampu mengatasi ketimpangan kota-desa.

Kawasan agri-urban adalah wilayah agribisnis atau sentra produksi pertanian yang memiliki kota pertanian (agropolis) sebagai pusat pelayanan. Konsep ini dikembangkan oleh *Friedman dan Douglass*, yang menekankan pentingnya agri-urban untuk pembangunan perdesaan di Asia dan Afrika. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembangunan desa dapat berjalan seiring dengan pembangunan kota pada tingkat lokal. Tiga isu utama yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Akses lahan pertanian dan pengairan
2. Desentralisasi politik dan administrasi
3. Perubahan kebijakan nasional yang mendukung diversifikasi produk pertanian.

Karena kota berfungsi sebagai pusat politik dan administrasi, pengembangan agri-urban umumnya lebih tepat dilakukan pada skala kabupaten. Menurut *Friedman dan Douglass* tujuan pembangunan agriurban adalah menciptakan *cities in the field* dengan memasukkan beberapa unsur penting dari gaya hidup kota ke dalam daerah perdesaan yang berpenduduk dengan kepadatan tertentu. Agri urban district merupakan satuan yang tepat untuk membuat suatu kebijakan Pembangunan ruang melalui desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan. Agri Urban district dapat dikembangkan di daerah perdesaan dengan kepadatan penduduk tinggi atau peri urban dengan tujuan untuk meningkatkan standar hidup, meningkatkan kesempatan bekerja dan mengurangi tingkat migrasi ke kota (Putra, 2023)

Pengembangan wilayah pada dasarnya mempunyai tujuan agar suatu wilayah dapat berkembang menuju tingkat perkembangan yang diinginkan. Salah satu pendekatan yang perlu dipertimbangkan untuk pengembangan wilayah adalah pengembangan sektor. Pengembangan wilayah berbasis sektor merupakan sebuah strategi perencanaan pembangunan yang berfokus pada identifikasi dan penguatan sektor unggulan pada suatu wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan kesejahteraan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan

agar dapat mengoptimalkan potensi dari satu atau beberapa sektor di wilayah tersebut yang dapat menjadi daya saing, menarik investor dan meningkatkan pendapatan wilayah (Esperanza, 2021).

Pengembangan wilayah berdasarkan sektor merupakan pendekatan yang memfokuskan pembangunan pada sektor-sektor ekonomi unggulan atau basis di wilayah yang memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan wilayah. Sektor unggulan biasanya berkaitan dengan perbandingan, baik perbandingan berskala regional, nasional, dan internasional. Suatu sektor dapat dikatakan unggulan jika sektor di wilayah tersebut dapat bersaing dengan sektor yang sama yang dihasilkan di wilayah lain. Sektor unggulan dipastikan memiliki potensi lebih besar untuk tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor lainnya dalam suatu daerah. Pertumbuhan tenaga kerja yang terserap, dan kemajuan teknologi (*technological progress*), penciptaan peluang investasi juga dapat dilakukan dengan memberdayakan potensi sektor unggulan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Mawikere., et al, 2005). Pengembangan wilayah berbasis sektor ekonomi bertujuan untuk memaksimalkan potensi pada setiap sektor ekonomi yang menjadi penggerak utama dalam perekonomian di wilayah tersebut. Beberapa konsep pengembangan wilayah berbasis sektor unggulan yaitu : Agropolitan, Metropolitan, dan Minapolitan.

a. Agropolitan

Agropolitan merupakan sebuah konsep pengembangan wilayah yang berfokus pada pertanian sebagai sektor unggulan dan sebagai penggerak utama pembangunan. Agropolitan memiliki arti kota pertanian atau pusat pertanian, beberapa daerah menerapkan konsep agropolitan untuk kemajuan daerah hal ini didasarkan bahwa sebagian besar wilayah Indonesia merupakan agraris/pertanian. Konsep Agropolitan merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan daerah melalui optimalisasi sumber daya tumbuhan dan hewan yaitu : pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.

Dengan terbentuknya sebuah kawasan agropolitan diharapkan akan mampu meningkatkan perekonomian wilayah tersebut. Kawasan agropolitan terdiri dari kota pertanian dan desa-desa sentra produksi pertanian yang ada di sekitarnya, dengan batasan yang tidak selalu ditentukan oleh batasan administrasi pemerintahan, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi yang ada. Kawasan agropolitan adalah kawasan agribisnis yang memiliki fasilitas perkotaan (Giovani, 2014).

Konsep dasar pengembangan kawasan agropolitan adalah sebagai upaya menciptakan pembangunan inter-regional berimbang yang bertujuan untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan kota-desa melalui pengembangan kawasan perdesaan yang terintegrasi dalam sistem perkotaan. Kawasan (Basuki, 2012)

b. Metropolitan

Kawasan metropolitan secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yang terbentuk dari kata meter yang berarti ibu dan kata polis yang berarti kota. Hal tersebut dapat diartikan bahwa kawasan metropolitan merupakan kawasan yang berperan sebagai pusat dari kota-kota yang berada di sekelilingnya. Pengertian metropolitan sendiri sangat identik dengan suatu kawasan yang menjadi pusat dari perkembangan suatu wilayah yang dapat menggerakkan perekonomian di wilayah tersebut dan memberikan dampak baik secara sosial, ekonomi maupun politik ke wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya.

Peran kawasan Metropolitan dalam pembangunan wilayah sebagai pusat penggerak utama ekonomi nasional dengan sektor industri, perdagangan, keuangan, dan teknologi yang berkembang pesat. Pusat-pusat perkantoran, bisnis, serta kawasan industri yang tersebar di kawasan ini turut meningkatkan perekonomian negara yang menyediakan akses yang lebih baik terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Fasilitas-fasilitas ini menarik lebih banyak orang untuk menetap dan bekerja di kawasan metropolitan, menjadikannya tempat yang lebih berkembang.

c. **Minapolitan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2010 Minapolitan terdiri dari kata mina dan kata politan. Mina berarti ikan dan Politan berarti kota, sehingga Minapolitan diartikan sebagai kota perikanan atau kota di daerah lahan perikanan atau perikanan di daerah kota. Minapolitan adalah kota perikanan yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha perikanan serta mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan ekonomi daerah sekitarnya (BPK, 2020). Program Minapolitan merupakan bagian dari Agropolitan yang secara fungsional bertumpu pada kegiatan sektor perikanan dengan basis pengembangan komoditas unggulan baik pada kegiatan budidaya laut, air payau maupun air tawar, termasuk produk-produk olahan dan jasa lingkungan perairan dalam suatu cluster kawasan yang terdiri dari beberapa desa atau kecamatan, sebagai upaya mewujudkan kesejajaran antara kota dengan desa. Minapolitan adalah konsep pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan yang berbasis pada suatu kawasan (Dewi, 2018).

Program minapolitan memiliki tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat kelautan perikanan. Kawasan minapolitan ini terdapat lebih dari satu pusat kegiatan yang termasuk ke dalam sistem produksi pertanian atau perikanan dan dilakukannya pengelolaan sumber daya (Harry, 2022). Terdapat prinsip – prinsip utama dalam minapolitan seperti :

1. Integrasi : Menyatukan seluruh rantai nilai perikanan (hulu hingga hilir) dalam satu kawasan.
2. Efisiensi: Mendorong penggunaan sumber daya yang optimal untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan daya saing
3. Kualitas: Memastikan produk perikanan yang dihasilkan memenuhi standar mutu, baik untuk pasar domestik maupun ekspor.
4. Mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.

Minapolitan merupakan salah satu strategi pemerintah, khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), untuk mengoptimalkan potensi sumber daya perikanan Indonesia. Tujuannya adalah menjadikan kawasan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat lokal (Dewi, 2018)

Minapolitan merupakan konsep pembangunan kelautan dan perikanan berbasis manajemen ekonomi kawasan dengan motor penggerak sektor kelautan dan perikanan dalam rangka peningkatan pendapatan rakyat. Pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan dengan konsepsi Minapolitan dikembangkan melalui peningkatan efisiensi dan optimalisasi keunggulan komparatif dan kompetitif daerah sesuai dengan eksistensi kegiatan pra produksi, produksi, pengolahan dan/atau pemasaran, serta jasa pendukung lainnya, yang dilakukan secara terpadu, holistik, dan berkelanjutan. Minapolitan bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat skala mikro dan kecil
- b. meningkatkan jumlah dan kualitas usaha skala menengah ke atas sehingga berdaya saing tinggi
- c. meningkatkan sektor kelautan dan perikanan menjadi penggerak ekonomi regional dan nasional.

Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan kawasan perdesaan melalui upaya-upaya penataan ruang kawasan perdesaan dan menumbuhkan pusat-pusat pelayanan fasilitas perkotaan (urban function center) yang dapat mengarah pada terbentuknya kota-kota kecil berbasis perikanan (minapolis) sebagai bagian dari sistem perkotaan dengan maksud meningkatkan pendapatan kawasan perdesaan (regional income) (Dewi, 2018).

2.1.4 Kawasan Minapolitan

a. Konsep Minapolitan

Kawasan minapolitan merupakan sebuah kawasan ekonomi yang berbasis perikanan dan kelautan dan di dalamnya terdiri dari beberapa aktivitas produksi dan perdagangan. Program minapolitan dibentuk dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di lingkungan masyarakat kelautan dan perikanan. Konsep Minapolitan didasarkan pada tiga azas yaitu :

1. Demokratisasi ekonomi kelautan dan perikanan pro rakyat
2. Pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan dengan intervensi negara secara terbatas (limited state intervention)
3. Penguatan daerah dengan prinsip: daerah kuat – bangsa dan negara kuat.

Ketiga prinsip tersebut sebagai landasan perumusan kebijakan dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan agar pemanfaatan sumberdayanya benar-benar untuk kesejahteraan rakyat dengan menempatkan daerah pada posisi sentral dalam pembangunan. Pengembangan kawasan minapolitan memiliki sasaran untuk memberikan kesejahteraan pada masyarakat yang ada di lingkungan kota perikanan tersebut (Harry, 2022).

Pengembangan Kawasan minapolitan yang secara lengkap disebutkan pada Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Minapolitan. Namun secara esensial, sasaran program minapolitan bisa disarikan menjadi 4 hal utama sebagai berikut :

1. Pelayanan secara terpadu dan efisien dari instansi pusat dan daerah serta instansi lintas-sektor pada kawasan minapolitan
2. Berkembangnya sektor ekonomi dari komoditas sektor perikanan
3. Kawasan sentra minapolitan bersama wilayah sekitarnya tumbuh sebagai kota mandiri
4. Pengisian tenaga kerja pada wilayah sekitar sentra minapolitan sesuai dengan kapasitas daya dukung produksi perikan (BPK, 2020).

Dalam rangka mengembangkan kawasan minapolitan secara integritas diperlukan adanya rencana induk (masterplan) terkait pengembangan kawasan minapolitan yang menjadi acuan penyusunan program pengembangan oleh

masing-masing kabupaten atau kota. Adapun muatan yang terkandung di dalamnya seperti :

1. Penetapan pusat agropolitan / minapolitan yang berfungsi sebagai :
 - a. Sebagai pusat perdagangan dan transportasi perikanan
 - b. Penyedia jasa pendukung perikanan
 - c. Pasar konsumen produk non perikanan
 - d. Pusat industri perikanan
 - e. Penyedia pekerja non perikanan
 - f. Pusat minapolitan dan hinterlandnya terkait dengan sistem permukiman nasional, provinsi, dan kabupaten (RTRW Provinsi/ Kabupaten)
2. Penetapan unit – unit kawasan pengembangan yang berfungsi sebagai :
 - a. Pusat Produksi perikanan
 - b. Intensifikasi perikanan
 - c. Pusat pendapatan Perdesaan dan permintaan untuk barang – barang dan jasa non perikanan
 - d. Produksi ikan siap jual dan diversifikasi perikanan
3. Penetapan sektor unggulan
 - a. Merupakan sektor unggulan yang sudah berkembang dan didukung oleh sektor hilirnya
 - b. Kegiatan minabisnis yang banyak melibatkan pelaku dan masyarakat yang paling besar
 - c. Mempunyai skala ekonomi yang memungkinkan untuk dikembangkan dengan orientasi ekspor
4. Dukungan sistem infrastruktur
Dukungan infrastruktur yang membentuk struktur ruang yang mendukung pengembangan kawasan minapolitan diantaranya : jaringan jalan, irigasi, sumber - sumber air, dan jaringan utilitas (listrik dan telekomunikasi)
5. Dukungan sistem kelembagaan

- a. Dukungan kelembagaan pengelola pengembangan kawasan minapolitan yang merupakan bagian dari pemerintah daerah dengan fasilitass pemerinbtah pusat.
- b. Pengembangan sistem kelembagaan insentif dan disinsentif pengembangan kawasan minapolitan

Dengan keterkaitan ini, pusat minapolitan dan kawasan produksi perikanan berinteraksi satu sama lain secara menguntungkan. Kawasan minapolitan adalah kawasan yang terdiri atas satu atau lebih pusat pada kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi perikanan dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem manabisnis. Dengan demikian kawasan minapolitan terdiri dari kota perikanan dan desa – desa sentra produksi perikanan yang da disekitarnya, dengan batasan yang tidak ditentukan oleh batasan adimistartif pemerintah, tetapi lebih ditentukan dengan memperhatikan skala ekonomi kawasan yang ada (Sahpitri, 2021).

Pengembangan Minapolitan diawali oleh adanya base line study untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rencana induk (master plan) kawasan dan jenis komoditas andalan yang akan dikembangkan dengan berbagai persyaratan, baik teknis maupun sosial untuk kemudian dapat digunakan sebagai indikator dalam evaluasi kinerja Minapolitan. Minapolitan ialah proses yang dinamis melibatkan peran multi-sektor secara terintegrasi untuk mewujudkan kota kecil secara mandiri dengan sektor penggerak ekonomi dari perikanan yang dilakukan secara berkelanjutan (Dewi, 2018).

b. Karakteristik dan Syarat Kawasan Minapolitan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Minapolitan, bahwa suatu kawasan minapolitan sebaiknya mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Kawasan ekonomi yang terdiri atas sentra produksi, pengolahan, dan atau pemasaran dan kegiatan usaha lainnya, misalnya jasa dan perdagangan
2. Kawasan minapolitan memiliki ketersediaan sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas ekonomi agar berjalan lancar
3. Kawasan minapolitan menampung dan mempekerjakan sumberdaya manusia yang berasal dari dalam kawasan dan daerah sekitarnya dan mampu menjadi motor perekonomian di daerah sekitarnya (Harry, 2022)

Dalam pengembangan kawasan minapolitan, suatu kawasan dapat ditetapkan sebagai kawasan minapolitan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Kesesuaian dengan Rencana Strategis, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) kabupaten/kota, serta Rencana Pengembangan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan
2. Memiliki komoditas unggulan di bidang kelautan dan perikanan dengan nilai ekonomi tinggi meliputi :
 - a. Keberadaan komoditas unggulan, yaitu melimpah atau dapat dibudidayakan dengan baik dengan prospek pengembangan tinggi dimasa depan
 - b. Nilai perdagangan komoditas tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut :
 1. Memiliki pasar: lokal, nasional dan internasional
 2. Volume atau kemampuan produksi tinggi : dapat atau berpotensi memenuhi permintaan pasar
 3. Tingkat produktivitas tinggi : kemampuan pemanfaatan teknologi untuk mencapai tingkat produktivitas tinggi atau dapat dikembangkan sehingga secara ekonomi menguntungkan
 4. Jumlah pelaku utama/usaha perikanan relatif besar atau sebagian besar penduduk setempat bekerja di kawasan tersebut

5. Mempunyai keunggulan komparatif : mempunyai nilai lebih karena keberadaan komoditas, iklim, SDM, dan ongkos produksi murah
 6. Mempunyai keunggulan kompetitif : produk berkualitas dan sistem pemasaran efektif.
3. Letak geografis kawasan yang strategis dan secara alami memenuhi persyaratan untuk pengembangan produk unggulan kelautan dan perikanan, meliputi :
- a. Lokasi kawasan strategis
 1. Jarak dan sistem transportasi
 2. Mempunyai akses terhadap jaringan pengadaan bahan baku, pengolahan, dan pemasaran (mata rantai pemasokan–supply chain)
 - b. Kawasan yang secara alami cocok untuk usaha kelautan dan perikanan
 1. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan
 2. Kesesuaian lahan dan potensi sumber daya air
 3. Sarana dan prasarana perikanan (Pelabuhan Perikanan, BBI, cold storage, pabrik es dll)
 4. Dekat dengan fishing ground
 5. Sentra produksi garam
 6. Sentra pengolahan dan pemasaran
4. Terdapat unit produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran dan jaringan usaha yang aktif memproduksi, mengolah dan/atau memasarkan yang terkonsentrasi di suatu lokasi dan mempunyai mata rantai produksi pengolahan, dan/atau pemasaran yang saling terkait, meliputi :
- a. Sistem dan mata rantai produksi perikanan budidaya
 1. Keberadaan sejumlah unit produksi ikan budidaya yang aktif memproduksi dan terkonsentrasi di sentra produksi
 2. Mata rantai produksi :
 - a. Keberadaan sarana atau lahan produksi: kolam dan tambak yang luas

- b. Fasilitas pengairan yang baik dan mencukupi atau potensi pengairan yang mungkin dikembangkan
 - c. Ketersediaan benih berkualitas tinggi atau kemungkinan pengadaan benih dengan harga murah
 - d. Ketersediaan pakan dan obat-obatan murah
 - e. Telah diterapkan sistem budidaya yang baik sehingga tingkat produksinya cukup tinggi dan berkualitas
 - f. Keterlibatan pembudidaya dan para pekerja setempat
 - g. Sistem distribusi dan pemasaran yang telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik
 - h. Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- b. Sistem dan mata rantai produksi perikanan tangkap
1. Keberadaan sejumlah kapal ikan yang aktif berproduksi dan mendaratkan hasil tangkapannya di lokasi tersebut
 2. Mata Rantai Produksi
 3. Hasil tangkapan yang cukup besar dan mempunyai skala ekonomi cukup tinggi
 4. Keberadaan sarana tambat, air bersih, tempat pendaratan ikan dan tempat pelelangan ikan yang memadai
 5. Sistem bongkar muat yang memadai atau mungkin dikembangkan dalam waktu dekat
 6. Keterlibatan nelayan dan para pekerja setempat
 7. Kegiatan di lokasi/pelabuhan perikanan/TPI mempunyai skala ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di sekitarnya
 8. Sistem distribusi dan pemasaran telah berjalan dengan baik atau dapat segera dikembangkan lebih baik
 9. Sentra produksi mempunyai skala usaha layak secara ekonomi dan multiplier effect terhadap perekonomian di daerah sekitarnya.
- c. Sistem dan mata rantai produksi hilir

- a. Keberadaan unit-unit pengolahan atau potensi pengembangannya dalam waktu dekat
 - b. Keberadaan kelembagaan/SDM pengawasan mutu
 - c. Sistem tata niaga produk hasil olahan dan fasilitas pendukungnya
 - d. Keberadaan fasilitas pasar atau sistem pemasaran produk
 - e. Sistem dan sarana distribusi (logistik) produk di dalam maupun di luar kawasan.
5. Tersedianya fasilitas pendukung berupa aksesibilitas terhadap pasar, permodalan, sarana dan prasarana produksi, pengolahan, dan/atau pemasaran, keberadaan lembaga usaha, dan fasilitas penyuluhan dan pelatihan, meliputi
- a. Permodalan: aksesibilitas modal bagi nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar ikan
 - b. Kelembagaan: lembaga pemerintahan daerah
 - c. Lembaga usaha: koperasi, kelompok usaha atau usaha skala menengah dan atas
 - d. Penyuluhan dan pelatihan: lembaga dan SDM Penyuluhan dan Pelatihan
 - e. Prasarana pengairan: keberadaan jaringan pengairan (budidaya) utama/primer, sekunder atau lainnya sebagai pendukung sistem pengairan di kawasan
 - f. Energi : jaringan listrik yang memadai
 - g. Teknologi tepat guna: Penerapan teknologi tepat guna yang mampu meningkatkan daya saing.
6. Kelayakan lingkungan diukur berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan, potensi dampak negatif, dan potensi terjadinya kerusakan di lokasi di masa depan, meliputi :
- a. Kondisi sumberdaya alam (daya dukung dan daya tampung)
 - b. Dampak atau potensi dampak negatif terhadap lingkungan
 - c. Sesuai tata ruang daerah dan nasional.

7. Komitmen daerah, berupa kontribusi pembiayaan, personel, dan fasilitas pengelolaan dan pengembangan minapolitan, meliputi
 - a. Sesuai Renstra dan Tata Ruang Daerah (RTRW Kabupaten/Kota), RTRW Provinsi dan RTRW Nasional
 - b. Mempertimbangan Rencana Zonasi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K)
 - c. Masuk dalam RPJM
 - d. Ditetapkan oleh Bupati/Walikota
 - e. Penyusunan Rencana Induk dan Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM)
 - f. Kontribusi anggaran APBD atau sumber dana lain yang sah
 - g. Keberadaan kelembagaan dinas yang membidangi kelautan dan perikanan dengan dukungan SDM yang memadai
 - h. Berkoordinasi dengan provinsi dan pusat
8. Keberadaan kelembagaan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan, meliputi
 - a. Keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu dinas yang bertanggung jawab di bidang kelautan dan perikanan
 - b. Kelompok kerja yang menangani pengembangan kawasan minapolitan.
9. Ketersediaan data dan informasi tentang kondisi dan potensi kawasan, meliputi :
 - a. Mempunyai data dan informasi mengenai sumber daya kelautan dan perikanan serta data dan informasi terkait
 - b. Mempunyai sistem pencatatan data statistik dan geografis di bidang kelautan dan perikanan (Dewi, 2018)

c. Ciri – Ciri Kawasan Minapolitan

Sebuah daerah atau kota bisa dikatakan sebagai kawasan minapolitan jika sudah memenuhi ciri-cirinya. Tanpa memenuhi ciri-cirinya maka tidak bisa dikatakan

sebagai kawasan minapolitan yang berkembang, adapun ciri – cirinya sebagai berikut :

- a. Sebagian besar kegiatan berhubungan dengan perikanan. Kegiatan tersebut saling terintegrasi yang di dalamnya mencakup kegiatan berupa penelitian, pengembangan, permodalan, dan sarana perikanan. Kegiatan usaha perikanan budidaya yang di dalamnya berupa kegiatan seperti usaha pembenihan ikan, penyediaan sarana perikanan dan proses pemasaran.
- b. Keterkaitan Antara Desa dan Kota. Keterkaitan tersebut bersifat timbal balik atau saling membutuhkan satu sama lainnya. Contoh sederhananya misal perdesaan yang menjadi kawasan budidaya perikanan dan juga produk olahan, sedangkan kota menjadi penyedia fasilitas agar usaha budidaya perikanan yang dilakukan di pedesaan dapat berkembang seperti : modal, informasi, peralatan perikanan, teknologi dan lain sebagainya.
- c. Didominasi Usaha Industri. Kegiatan yang berhubungan dengan usaha industri meliputi minawisata, perdagangan perikanan mian dan jasa pelayanan, contohnya : perdagangan hasil perikanan, baik itu dalam bentuk segar atau sudah berupa olahan. Inilah alasan kawasan minapolitan disebut sebagai sebuah kota yang berada di daerah perikanan atau kota perikanan.
- d. Infrastruktur yang Tersedia. Kegiatan industri tidak dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai, maka tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah alat dan peralatan yang dibutuhkan untuk melancarkan kegiatan. (Harry, 2022)

d. Fungsi Kawasan Minapolitan

Pengembangan Minapolitan sebagai sebuah program yang bertujuan untuk mengurangi pengangguran, membuka kesempatan kerja dan berusaha masyarakat, serta menekan laju urbanisasi. Minapolitan sebagai sebuah program dengan diwujudkan melalui sistem kawasan minabisnis, minaindustri dan minawisata. Kawasan minapolitan dikembangkan menjadi beberapa fungsi kawasan, fungsi tersebut diantaranya :

1. **Kawasan Minabisnis**

Kegiatan perikanan merupakan kegiatan utama di kawasan Minabisnis, mengingat kawasan Minabisnis sebagai kawasan Agribisnis yang berbasis pada sektor perikanan. Produk di kawasan Minabisnis berorientasi pada pasar baik pasar lokal maupun pasar regional, dengan mutu serta harga yang kompetitif dan terjamin kesediaannya sepanjang tahun.

2. **Kawasan Minaindustri**

Kawasan Minaindustri dikembangkan sebagai pusat industri pedesaan yang memiliki skala usaha kecil dan bersifat tidak polutif. Usaha dan kegiatan industri di kawasan Minaindustri memenuhi kebutuhan desa-desa sekitarnya. Desa-desa di kawasan Minaindustri berbasis perikanan dengan tenaga dan teknologi yang berasal dari masyarakat setempat. Kegiatan industri di kawasan Minaindustri menghasilkan produk-produk untuk bahan baku industri pengolahan hasil perikanan.

3. **Kawasan Minawisata**

Kawasan Minawisata mempunyai potensi wisata yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan utama kawasan, serta didukung oleh kegiatan lokal yang bersifat saling melengkapi seperti pertanian tanaman pangan, sayuran, maupun industri pariwisata baik kegiatan wisata alam dan wisata buatan. Minawisata didukung dengan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan jaringan pada tingkatan yang lebih tinggi seperti jalur provinsi maupun jalur nasional (Dewi, 2018)

Pengembangan kawasan minapolitan dilakukan dengan tujuan untuk memastikan kemakmuran rakyat dan menjaga keseimbangan lingkungan agar hidup lebih berkelanjutan. Pengembangan dilakukan dengan terencana,

rasional, optimal, dan tentunya bertanggung jawab. Kawasan minapolitan merupakan sebuah program yang dibuat oleh pemerintah dalam proses pengembangan sebuah wilayah perikanan yang sudah terintegrasi. Dalam pengembangan kawasan minapolitan terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satu kendala terbesar dalam mengembangkan kawasan minapolitan yaitu minimnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kawasan ini, dengan menganggap jika kawasan minapolitan tersebut akan merusak lingkungan. Lingkungan yang tidak memadai menjadi salah satu kendala dalam pengembangan kawasan minapolitan. Kondisi lingkungan yang dimaksud lingkungan yang mempunyai sarana dan prasarana yang sangat minim. Hal tersebut akan membawa dampak yang negatif dalam pengembangan kawasan minapolitan (Harry, 2022).

e. Kawasan Minapolitan Berkelanjutan

Kawasan pengembangan minapolitan berkelanjutan merupakan kawasan pengembangan ekonomi perikanan yang mengutamakan fungsi produksi, pengolahan, pemasaran, pelayanan jasa, dan kegiatan pendukungnya. Tujuan dari pengembangan kawasan minapolitan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi & infrastruktur, dan kelembagaan untuk jangka waktu yang panjang. Pengembangan kawasan minapolitan harus memastikan keberlanjutan lingkungan, kesejahteraan masyarakat, efektivitas ekonomi, dukungan teknologi serta informasi dan penguatan kelembagaan untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan di sektor kelautan dan perikanan (Wibowo, 2015). Pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya menekankan pada peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tetapi memperhatikan kelestarian ekosistem pesisir, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan masyarakat lokal agar dapat berperan aktif dalam rantai nilai perikanan dari hulu hingga hilir (Rokhman, 2015).

Tujuan Pengembangan yaitu menciptakan kawasan yang saling mendukung dan efisien dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, meningkatkan kinerja sektor kelautan dan perikanan melalui integrasi komoditas unggulan dan praktik ekonomi biru, dan menciptakan keseimbangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta mencegah urbanisasi yang tidak terkendali. Minapolitan merupakan bagian wilayah dengan fungsi utama ekonomi yang mencakup sentra produksi perikanan, budidaya, pengolahan, pemasaran, dan pelayanan jasa pendukung. Berkelanjutan merupakan prinsip pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan pada masa ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dimasa yang akan datang.

2.1.5 Indeks Keberlanjutan

Indeks keberlanjutan kawasan minapolitan merupakan sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kawasan dapat berkembang secara berkelanjutan dengan menggunakan beberapa dimensi yang mencakup beberapa indikator di dalamnya seperti : dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi & infrastruktur, dan kelembagaan. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) dengan menggunakan metode RAP – Minapolitan yang akan menghasilkan nilai 0 hingga 100, artinya semakin tinggi nilai indeks tersebut maka akan menunjukkan tingkat keberlanjutan yang lebih baik (Suryawati, 2011).

Multidimension Scaling (MDS) merupakan pencarian ruang dimensi yang kecil yang dapat menyajikan objek – objek sedemikian, sehingga jarak antar objek pada ruang dimensi tersebut sesuai dengan jarak asli antar objek yang diamati. MDS digunakan untuk menghitung sustainability index dari sebuah objek berdasarkan dimensi, terdapat beberapa kegunaan MDS seperti :

1. Menyajikan data multidimensi secara sederhana, data yang kompleks dengan banyak atribut yang dapat direduksi menjadi dua atau tiga dimensi bahkan lebih mudah dipahami dan divisualisasikan

2. Menentukan status keberlanjutan, nilai indeks yang dihasilkan (0-100) dapat dikategorikan menjadi tidak berkelanjutan, kurang berkelanjutan, cukup berkelanjutan dan sangat berkelanjutan.
3. Mengidentifikasi atribut sensitif, MDS dilengkapi dengan analisis leverage, yang dapat menunjukkan atribut/variable mana yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberlanjutan suatu dimensi
4. Menguji reliabilitas analisis, melalui analisis *Monte Carlo*, MDS dapat menguji kestabilan hasil dan memastikan bahwa perbedaan nilai indeks tidak disebabkan oleh kesalahan acak dalam proses analisis. (Adiningsih, 2023)

Multidimensional Scaling adalah untuk menyajikan objek-objek secara visual berdasarkan kemiripan yang dimiliki. Kegunaan lain dari teknik ini ialah mengelompokkan objek-objek yang memiliki kemiripan dilihat dari beberapa peubah yang dianggap mampu mengelompokkan objek – objek tersebut. Analisis data MDS digunakan nilai-nilai yang menggambarkan tingkat kemiripan atau tingkat ketidakmiripan antar objek yang disering disebut *proximity* yang dibagi menjadi dua yaitu :

1. Similarity (kemiripan) yaitu jika semakin kecil nilai jaraknya menunjukkan bahwa objeknya lebih mirip
2. Dissimilarity (ketakmiripan) yaitu jika semakin besar nilai jaraknya, menunjukkan bahwa objeknya semakin tak mirip.

Dimensi keberlanjutan dalam kawasan minapolitan mengevaluasi dan mengintegrasikan lima dimensi utama yaitu :

1. Dimensi Ekologi
Bertujuan untuk menjaga dan melestarikan lingkungan pada kawasan minapolitan agar tidak melebihi ambang batas lingkungan yang sudah ditentukan dan meminimalisir dampak terhadap ekosistem dan habitat yang ada di kawasan minapolitan

2. Dimensi Ekonomi

Memastikan efisiensi produksi dan pemasaran, peningkatan ekonomi pada komoditas perikanan dan diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sesuai agar meningkatkan pertumbuhan ekonomi

3. Dimensi Sosial

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal

4. Dimensi Teknologi dan Infrastruktur

Membangun dan menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang mendukung dalam kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran termasuk di dalamnya jaringan irigasi, aksesibilitas dan transportasi

5. Dimensi Kelembagaan

Membangun sistem kelembagaan yang efektif dan terkoordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta untuk mendukung pengelolaan kawasan minapolitan yang terarah dan terintegrasi (Rokhman, 2015)

2.1.6 Metode Analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats*)

Analisis SWOT merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pengembangan suatu wilayah atau kawasan. Analisis SWOT memberikan gambaran mengenai kondisi dan situasi yang dihadapi suatu objek perencanaan melalui pengelompokan faktor-faktor yang ada ke dalam kategori kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Hasil identifikasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam merumuskan strategi pengembangan yang sesuai dengan potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi wilayah atau kawasan yang dikaji (Safitri, 2024).

Menurut Rangkuti (2005) dalam Putriani (2017) Analisis Swot merupakan identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan sebuah strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan

kekuatan (Strengths) dan lima peluang (Opportunities) tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan dengan cara ini selalu dikaitkan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan usaha. Jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal (peluang dan ancaman) dan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) untuk menetapkan formulasi sebuah strategi (perencanaan strategi) dalam upaya penyusunan strategi jangka panjang. Dalam analisis SWOT terdapat dua faktor lingkungan usaha berupa :

1. Lingkungan Internal yaitu suatu kekuatan, suatu kondisi, suatu peristiwa yang saling terkait dimana indikator tersebut mempunyai kemampuan untuk mengendalikannya
2. Lingkungan Eksternal yaitu suatu keadaan atau suatu kondisi, suatu kekuatan atau sebuah kekuatan yang saling terkait dimana indikator tersebut memiliki kemampuan atau sedikit kemampuan untuk mengendalikan atau mempengaruhinya

Diagram kartesius SWOT digunakan untuk menentukan letak posisi yang strategis berdasarkan hasil analisis faktor internal dan faktor eksternal.

Penentuan posisi kuadran dilakukan dengan menghitung selisih antara total nilai kekuatan dan kelemahan sebagai sumbu horizontal (X) dan selisih antara total nilai peluang dan ancaman sebagai sumbu vertikal (Y). Nilai hasil perhitungan tersebut kemudian diplot ke dalam diagram kartesius SWOT untuk mengetahui posisi objek yang dikaji pada salah satu dari empat kuadran strategi yang tersedia (Safitri, 2024)

Matriks SWOT merupakan alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor mana yang paling strategis. Matriks dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi yang dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan indikator yang dimiliki (Putriani, 2017). Menurut David (2016) dalam Yaqin (2021) terdapat empat tipe strategi yang dapat disusun menggunakan matriks SWOT yaitu :

1. Strategis SO (*Strengths – Opportunities*)
2. Strategis WO (*Weakness – Opportunities*)
3. Startegis ST (*Strengths – Therats*)
4. Strategis WT (*Weakness – Therats*)

Tujuan empat strategi ini untuk memudahkan dalam merumuskan berbagai strategi yang perlu dirumsukan. Matrik ini dibuat denagn mengelompokkan masing-masing unsur masalah SWOT ke dalam tabel matriks dengan tujuan agar jelas menggambarkan bagaimana menyesuaikan sebuah startegi berdasarkan faktor kelemahan dan faktor kekuatan (Yaqin,2021)

2.1.7 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkarya teori yang digunakan.

Penelitian terdahulu memiliki peran dalam proses penyusunan dalam penelitian ilmiah. Tujuan dari penelitian terdahulu adalah untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai topik yang akan diteliti dan menelaah serta menganalisis bagaimana penelitian sebelumnya dilakukan. Penelitian terdahulu juga berfungsi sebagai landasan teori dan pembanding dalam penelitian agar dapat diidentifikasi persamaan dan perbedaan dalam aspek-aspek penting seperti tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu pelaksanaan, serta temuan atau hasil yang diperoleh (Padaniah, 2021).

Penelitian terdahulu dapat membantu dalam merumuskan strategi pengumpulan data yang tepat, menentukan metode analisis data yang sesuai, serta memperkirakan potensi kendala yang mungkin dihadapi. Oleh karena itu, penelitian terdahulu bukan sekadar menjadi acuan semata dalam penyusunan hasil dan pembahasan, melainkan juga menjadi komponen krusial dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian secara keseluruhan. Analisis komparatif dari penelitian-penelitian tersebut akan menjadi dasar dalam mengembangkan kerangka konseptual dan metodologis dalam penelitian ini.

Data pendukung dalam sebuah penelitian sangatlah penting untuk dijadikan referensi pada teori atau temuan dari penelitian sebelumnya menjadi dasar acuan yang relevan. Kajian terhadap penelitian terdahulu dapat dilihat dalam Tabel 1

Kajian penelitian terdahulu memberikan berbagai kontribusi terhadap penelitian ini, di antaranya yaitu :

1. Penelitian sebelumnya memberikan gambaran mengenai tingkat keberlanjutan kawasan minapolitan di berbagai daerah di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang dapat menjadi dasar perbandingan dengan kondisi di Kabupaten Lampung Selatan.
2. Kajian terdahulu memperlihatkan bahwa beberapa dimensi, seperti ekologi, ekonomi, dan sosial, sering kali memiliki nilai keberlanjutan yang rendah, sedangkan dimensi kelembagaan relatif lebih kuat. Hal ini menjadi masukan penting bagi penelitian baru untuk melihat dimensi mana yang masih perlu diperkuat di kawasan minapolitan
3. Penelitian terdahulu juga telah menguji berbagai metode analisis, seperti *Multidimensional Scaling (MDS)* dengan perangkat RAP-Minapolitan, SWOT, dan AHP, yang dapat menjadi acuan dalam pemilihan metode penelitian untuk menilai keberlanjutan kawasan minapolitan di lokasi penelitian ini.

Kontribusi kajian penelitian terdahulu membawa perbedaan yang menjadi kebaruan dalam penelitian ini, di antaranya yaitu :

1. Belum banyak penelitian secara spesifik mengkaji Tingkat keberlanjutan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan, sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberikan temuan baru terkait kondisi keberlanjutan pengembangan di kawasan tersebut.
2. Pada penelitian sebelumnya hanya menekankan satu atau beberapa dimensi saja, seperti ekologi atau ekonomi, sementara penelitian ini akan

menganalisis keberlanjutan kawasan minapolitan secara multidimensi (ekonomi, sosial, ekologi, kelembagaan, dan infrastruktur - teknologi).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, diketahui bahwa penelitian mengenai keberlanjutan kawasan minapolitan telah banyak dilakukan dengan fokus pada pengukuran tingkat keberlanjutan maupun strategi pengembangan kawasan. Penelitian Fauziah (2024) fokus pada analisis tingkat keberlanjutan dan faktor pengungkit kawasan minapolitan perikanan tangkap menggunakan pendekatan MDS-Rapfish, sedangkan penelitian Satria (2024) lebih berfokus pada strategi pengembangan kawasan melalui analisis SWOT, QSPM, dan AHP. Penelitian lainnya juga cenderung mengevaluasi keberlanjutan pada sektor perikanan atau pertanian berbasis perairan dengan pendekatan multidimensi.

Penelitian terdahulu masih memiliki keterbatasan, yaitu belum banyak yang mengintegrasikan analisis tingkat keberlanjutan multidimensi menggunakan MDS-Rapfish dengan perumusan strategi pengembangan melalui analisis SWOT dalam satu kajian penelitian, khususnya pada kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap. Penelitian mengenai keberlanjutan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan masih terbatas, sehingga belum tersedia informasi yang komprehensif terkait kondisi keberlanjutan kawasan dan strategi pengembangannya.

Tabel 1. Penelitian terdahulu

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
1	Fauziyah (2024)	Tingkat Keberlanjutan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Di Kabupaten Lamongan	Mengetahui tingkat keberlanjutan dan faktor pengungkit keberlanjutan kawasan minapolitan perikanan tangkap di pesisir Kabupaten Lamongan.	MDS - Rapfish	Kawasan minapolitan berbasis perikanan tangkap Kabupaten Lamongan tergolong cukup berkelanjutan.
2	Gumelar (2024)	Tingkat Keberlanjutan Kawasan Mianapolitan Perikanan Tangkap Di Pesisir Kabupaten Lamongan Strategi Pengembangan Kawasan Agroekonomi Minapolitan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung	Mengetahui kondisi potensi pengembangan subsektor perikanan dalam perekonomian wilayah serta menganalisis strategi pengembangan kawasan Minapolitan di Kabupaten Tanggamus.	SWOT, QSPM dan AHP	Menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengatasi permasalahan modal dan pemasaran, meningkatkan nilai tambah pada hasil pemasaran perikanan melalui pembinaan masyarakat nelayan dan Meningkatkan teknologi yang digunakan di sektor perikanan dengan meningkatkan pelatihan teknologi.
3	Fyka (2024)	Sustainability Evaluation of Mina Padi Farming in Lebak Swamps Using The MDS Method	Mengevaluasi keberlanjutan pertanian Mina Padi di Desa Lebak	MDS - Rapfish	Indeks keberlanjutan pada keseluruhan dimensi ekonomi dan dimensi ekologi dikatakan berkelanjutan, sementara dimensi infrastruktur dan teknologi dikatakan cukup berkelanjutan

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
4	Adiningsih (2023)	Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Kecamatan Puger	1. Mengetahui kondisi eksisting dari kawasan minapolitan berkelanjutan berdasarkan lima dimensi (ekologi, ekonomi, sosial, infrastruktur dan kelembagaan) 2. Mengetahui nilai berkelanjutan di Kawasan Minapolitan Kecamatan Puger	Analisis AHP dan SWOT	Kawasan minapolitan berada di kategori berkelanjutan optimal, akan tetapi terdapat dua dimensi yang menunjukkan belum optimal yaitu dimensi ekologi dan ekonomi.
5	El Kifaf (2023)	Keberlanjutan Usaha Tambak Bandeng Melalui Pendekatan Multi Dimension Scalling (MDS)	Menganalisis status keberlanjutan usaha tambak bandeng di Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik	MDS - Rapfish	Status keberlanjutan usaha tambak bandeng pada keempat dimensi, yaitu dimensi lingkungan, ekonomi, sosial, dan teknologi sama-sama berada pada kategori cukup berkelanjutan.
6	Suprianto (2022)	Evaluasi Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Pemasaran di Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi	Mengevaluasi kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, dan sistem pemasaran budidaya perikanan pada kawasan minapolitan Kabupaten Merangin	MDS - Rapfish	Terdapat 3 aspek dengan status cukup berkelanjutan, yaitu; aspek SDM, aspek teknologi, dan aspek SDA. Sementara itu, terdapat 2 aspek dengan status kurang berkelanjutan, yaitu ; aspek kelembagaan dan aspek ekonomi
7	Wibowo (2021)	Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi Dalam Pengembangan	Mengkaji status keberlanjutan dimensi ekologi dalam	RAP-multidimensi dan Analytical Hierarchy Proses (AHP)	Status keberlanjutan dimensi ekologi dalam pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
8	Al Mukari (2021)	Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Magelang Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Di Desa Watobuku, Kecamatan Solor Timur, Kabupaten Flores Timur	pengembangan kawasan minapolitan Meningkatkan ekonomi masyarakat pesisir Desa Waatobuku melalui konsep pengembangan kawasan Minapolitan berkelanjutan	Analisis LQ dan SWOT	Magelang berada pada status cukup berkelanjutan <ul style="list-style-type: none"> • Potensi perikanan di Desa Watobuku mendukung untuk pengembangan kawasan minapolitan untuk dijadikannya sebagai kawasan minabisnis dan minaindustri • Strategi pengembangan Kawasan Minapolitan secara berkelanjutan di Desa Watobuku dapat di kembangkan dan harus didukung dengan mengoptimalkan sumber daya manusia, infrastruktur dan bantuan pemerintah
9	Sitorus (2020)	Analisis Keberlanjutan Budidaya Udang Vaname (<i>Litopenaeus Vannamei</i>) Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Beberapa Desa	1. Menganalisis indeks dan status keberlanjutan budidaya Udang Vaname berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial dan kelembagaan di beberapa desa di Kecamatan Pantai Cermin	Rap -Aquaculture Minapolitan modifikasi dari perangkat Rapfish.	<ul style="list-style-type: none"> • Desa Kota Pari pada dimensi ekologi dan ekonomi berada pada status kurang berkelanjutan, dimensi sosial berada pada status tidak berkelanjutan, sementara dimensi kelembagaan berada

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
		Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Sebagai Provinsi Sumatera Utara	<p>2. Menganalisis faktor/atribut yang sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan budidaya Udang Vaname</p> <p>3. Membuat strategi atau kebijakan mendukung keberlanjutan budidaya Udang Vaname.</p>		<p>pada status cukup berkelanjutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategi prioritas yang dapat dilakukan untuk meningkatkan status keberlanjutan budidaya Udang Vaname adalah : penanaman dan pemeliharaan mangrove di sekitar tambak, peningkatan pelatihan dan penyuluhan budidaya perikanan berwawasan lingkungan dan optimalisasi peran Dinas Perikanan dan Kelautan sebagai wadah konsultasi terbuka bagi petambak.
10	Wibowo (2020)	Analisis Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Berkelanjutan Di Kabupaten Situbondo	Mengkaji kelayakan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Situbondo yang berkelanjutan	Fuzzy Inference System	Secara parsial dan agregat Kawasan minapolitan di Kabupaten Situbondo layak dikembangkan berdasarkan kesesuaian aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan . Kawasan minapolitan di Kabupaten Situbondo dapat dikembangkan menjadi kawasan minapolitan yang berkelanjutan

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
11	Karepsian (2019)	Status Keberlanjutan dan Strategoi Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Barat	Mengetahui kondisi eksisting, menganalisis tingkat keberlanjutan, dan merumuskan kebijakan prioritas pengembangan Kawasan Minapolitan	Rapfish dan Analytical Hierarchy Process (AHP)	<ul style="list-style-type: none"> Status keberlanjutan dalam dimensi ekologi, ekonomi, dan kelembagaan memperoleh nilai indeks cukup berkelanjutan Dimensi sosial dan teknologi memperoleh nilai indeks berkelanjutan sehingga diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah untuk pemanfaatan potensi perikanan budidaya secara optimal
12	Akbar (2018)	Strategi Peningkatan Keberlanjutan Kawasan Minapolitan Kecamatan Wajak Kabupaten Malang	Menentukan tingkat keberlanjutan kawasan minapolitan Kecamatan Wajak ditinjau dengan dimensi ekonomi, sosial – kelembagaan, ekologi, teknologi - infrastruktur	MDS - Rapfish	Kawasan minapolitan cukup berkelanjutan. Tingkat keberlanjutan ini menunjukkan bahwa kondisi Kawasan Minapolitan Kecamatan Wajak masih perlu ditingkatkan, pada dimensi ekonomi, sosial-kelembagaan, dan teknologi-infrastruktur
13	Arsyad (2017)	Analisis Keberlanjutan Kawasan Minapolitan Budidaya Di Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	Menganalisis tingkat keberlanjutan budidaya perikanan Minapolitan yang berlokasi di Desa Sarasa, Kecamatan Dapurang, Kabupaten Mamuju Utara.	MDS – Rapfish	Status keberlanjutan budidaya perikanan Minapolitan di Desa Sarasa cukup berkelanjutan karena nilai indeks yang dihasilkan sebesar 65,33. Status keberlanjutan dalam hal dimensi teknologi kurang berkelanjutan. Oleh karena itu,

No	Nama Penulis dan Tahun	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil
14	Wibowo (2015)	Status keberlanjutan Dimensi Ekologi dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Magelang	Mengkaji status keberlanjutan dimensi ekologi dalam pengembangan kawasan minapolitan	MDS – Rapfish dan AHP	<p>persiapan dan implementasi kebijakan yang dapat meningkatkan kondisi keberlanjutan budidaya Minapolitan dianggap perlu.</p> <p>Status keberlanjutan dimensi ekologi dalam pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Magelang berada pada status cukup berkelanjutan. Strategi untuk peningkatan status keberlanjutan dilakukan dengan perbaikan pada atribut yang sensitif berpengaruh signifikan terhadap nilai dan status berkelanjutan.</p>
15	Suryawati (2011)	Analisis Ex – Ante Keberlanjutan Program Minapolitan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan indeks keberlanjutan program minapolitan di lokasi penelitian 2. Mengidentifikasi atribut pengungkit 3. Menyusun arahan kebijakan 	MDS – Rapfish	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensi ekologi dan ekonomi kurang berkelanjutan • Dimensi politik dan hukum kelembagaan sangat berkelanjutan • Dimensi sosial dan budaya cukup berkelanjutan • Dimensi teknologi – infrastruktur tidak berkelanjutan

2.2 Kerangka Pemikiran

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan ekologi untuk menjamin kesejahteraan. Konsep ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pengembangan wilayah yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal secara maksimal dan lestari.

Pengembangan wilayah pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan. Pengembangan wilayah tidak terfokus pada pemerataan infrastruktur saja tetapi diarahkan menjadi pengembangan berbasis sektor unggulan sesuai dengan karakteristik dan potensi yang dimiliki masing – masing wilayah. Pendekatan ini menghasilkan konsep pengembangan wilayah yaitu : Agropolitan, Metropolitan, dan Minapolitan.

Pengembangan kawasan Minapolitan merupakan sebuah kawasan ekonomi yang sektor unggulannya yaitu sektor perikanan. Program minapolitan bertujuan untuk mendorong percepatan pengembangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, dan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomu baru yang berdaya saing.

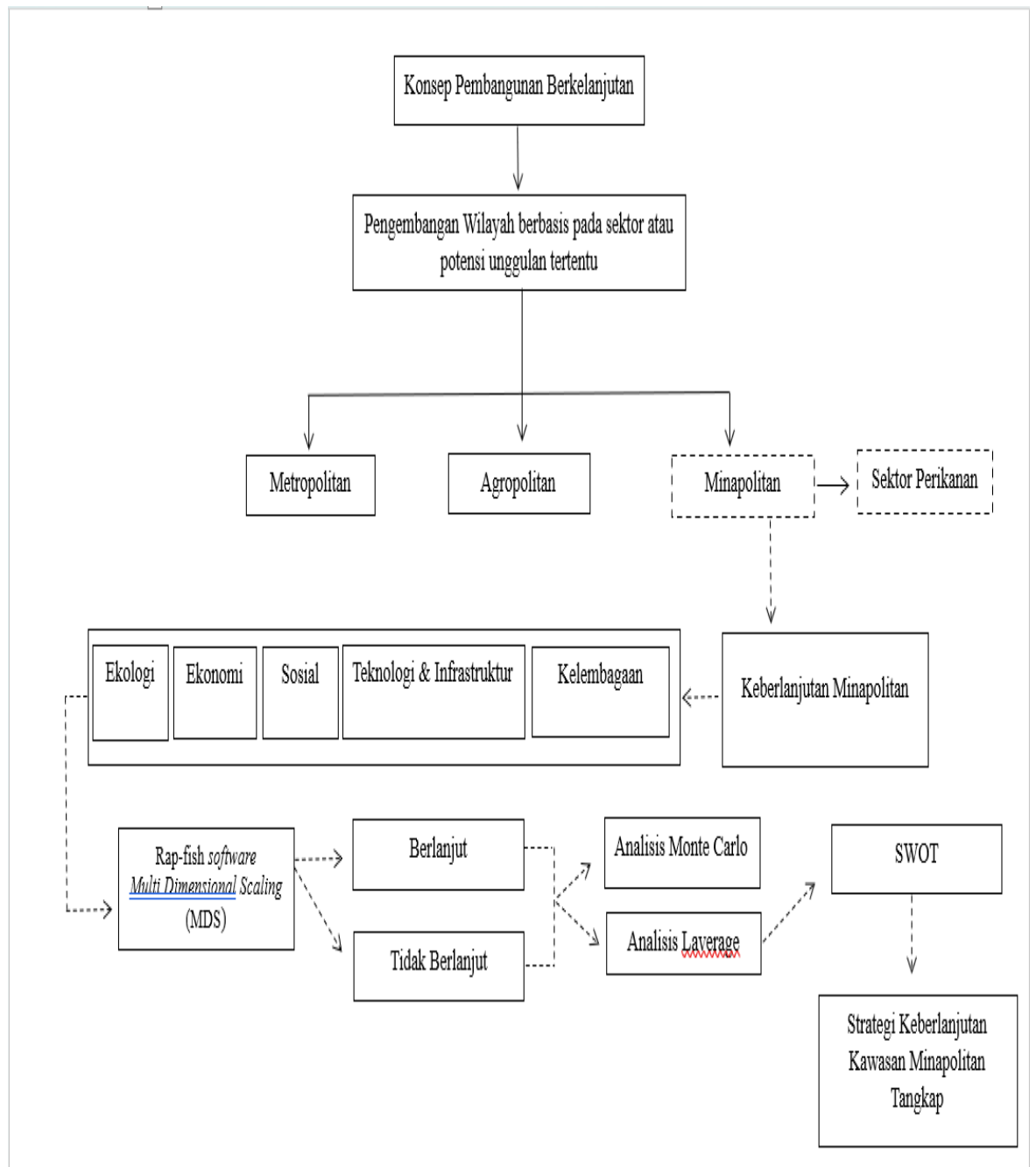
Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah yang sangat potensial dalam sektor perikanan dan pengembangan kawasan minapolitan di Provinsi Lampung karena terletak di wilayah pesisir Provinsi Lampung yang sebagian besar wilayahnya terletak di sepanjang garis pantai dengan panjang 247,76 km (BPS, 2024). Pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Lampung Selatan menghadapi beberapa permasalahan, seperti : keterbatasan infrastruktur pendukung, aksesibilitas, akses permodalan dan teknologi yang belum merata, lemahnya kelembagaan pada nelayan dan kelompok budidaya dan isu mengenai keberlanjutan lingkungan akibat kegiatan perikanan yang belum sepenuhnya ramah lingkungan. Keadaan pasar global dan nasional juga dapat memengaruhi stabilitas harga serta daya saing produk perikanan lokal.

Keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan tidak hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja, tetapi ditentukan juga dari aspek ekonomi, ekologi, sosial, teknologi & infrastruktur, dan kelembagaan.

Indeks keberlanjutan kawasan minapolitan merupakan sebuah pengukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana sebuah kawasan minapolitan dapat berkembang secara berkelanjutan dengan menggunakan beberapa dimensi yang mencakup beberapa indikator di dalamnya seperti : dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi - infrastruktur, dan kelembagaan. Pengukuran indeks dilakukan dengan menggunakan analisis *Multidimensional Scaling* (MDS) dengan menggunakan metode RAP

Berdasarkan latar belakang peneliti akan menganalisis keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan Kabupaten Lampung Selatan Provinsi Lampung dengan menggunakan pendekatan *Multidimensional Scaling / MDS* yang dianalisis berdasarkan lima indikator seperti : ekonomi, ekologi, sosial, teknologi & infrastruktur, dan kelembagaan dengan menggunakan uji *Rapfish* untuk dilakukan penilaian terhadap status keberlanjutan suatu sistem.

Perumusan kebijakan dapat dianalisis melalui analisis SWOT untuk merumuskan kebijakan untuk keberlanjutan kawasan pengembangan minapolitan di Kawasan Minapolitan di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan



Keterangan :

- > : Tidak diuji secara statistik
 - - - - -> : Diuji secara statistik

Gambar 1 : Kerangka pemikiran penelitian analisis keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan

III METODELOGI PENELITIAN

3.1 Konsep Dasar dan Batasan Operasional

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung ke lokasi penelitian dan dilakukan wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Konsep dasar dan batasan operasional merupakan pengertian dan petunjuk mengenai variabel yang akan diteliti untuk mendapatkan dan menganalisis data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Menurut Sugiyono (2015) batasan operasional merupakan suatu atribut atau sifat atau nilai dari suatu objek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik sebuah kesimpulan. batasan variabel – variabel penelitian harus dirumuskan guna menghindari kekeliruan dalam mengumpulkan data. Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, atau obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Ilham, 2019). Konsep dasar dan batasan operasional ini mencakup pengertian yang digunakan sebagai penunjang dan untuk menciptakan data yang akurat yang nantinya akan digunakan untuk dianalisis sehubungan dengan tujuan dari penelitian ini. **Analisis** merupakan sebuah proses mengolah data yang sudah dikumpulkan (baik dari observasi, kuesioner, atau wawancara) untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian.

Keberlanjutan adalah konsep yang mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam.

Status keberlanjutan adalah kondisi atau tingkat mengenai suatu sistem, organisasi, proyek, atau kegiatan yang dapat dipertahankan dalam jangka panjang tanpa merusak lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam jangka panjang.

Pengembangan Kawasan adalah proses mengoptimalkan potensi suatu wilayah (baik sumber daya alam, manusia, ekonomi, maupun sosial) agar wilayah tersebut lebih produktif, berdaya saing, dan sejahtera, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Minapolitan merupakan konsep pengembangan wilayah berbasis perikanan dan kelautan yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir atau perdesaan perikanan.

Kawasan Minapolitan adalah wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang terintegrasi dengan kegiatan pengolahan, pemasaran, dan jasa penunjang lainnya sehingga membentuk sistem ekonomi berbasis perikanan yang berkelanjutan.

Minapolitan Berkelanjutan adalah konsep pengembangan kawasan perikanan yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, kelembagaan, dan kelestarian lingkungan agar manfaatnya dapat dirasakan secara terus-menerus oleh generasi sekarang dan mendatang.

Keberlanjutan Ekologi pada Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah upaya menjaga dan mengelola keseimbangan serta kelestarian lingkungan perairan dan pesisir agar kegiatan perikanan dapat terus berlangsung tanpa merusak ekosistem yang menjadi sumber kehidupannya

Ancaman Bencana Alam merupakan potensi bencana alam yang dapat menimbulkan kerugian di kawasan minapolitan. Ancaman ini diukur berdasarkan tingkat kerentanan dan risiko wilayah dengan skala indikator

0 = sangat sering, tingkat ancaman sangat tinggi dan sifatnya berulang

1 = sering, frekuensi cukup sering dan berpotensi mengganggu aktivitas perikanan

2 = cukup sering, frekuensi sedang, relatif jarang terjadi

3 = jarang, frekuensi jarang terjadi dan tingkat ancaman rendah

4 = sangat jarang, hampir tidak pernah mengalami bencana, tingkat ancaman rendah

Lokasi Tempat Tangkap merupakan wilayah perairan yang digunakan nelayan untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan perairan, jarak tempuh, dan potensi sumber daya ikan dalam mendukung keberlanjutan perikanan tangkap dengan skala indikator

0 = semakin jauh lokasi tangkap maka akan memerlukan biaya operasional yang lebih besar yang menunjukkan menurunnya ketersediaan sumber daya ikan di sekitar wilayah pesisir

1 = lebih jauh yaitu terjadi perubahan lokasi penangkapan ke wilayah yang lebih jauh dengan akses yang mulai sulit dijangkau akibat perubahan kondisi lingkungan perairan dan ketersediaan ikan

2 = relatif sama

3 = dekat, lokasi relatif tetap dan akses cukup mudah dijangkau

4 = semakin dekat yaitu lokasi dekat akses mudah dijangkau

Trend Hasil Tangkapan Ikan merupakan Pola perubahan jumlah hasil tangkapan ikan oleh nelayan dalam periode waktu tertentu dengan skala indikator ;

0 = sangat menurun

1 = menurun

2 = relatif stabil

3 = meningkat

4 = sangat meningkat

Status Eksploitasi Sumber Daya Ikan merupakan ketersediaan ikan di laut berdasarkan hasil tangkapan dan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan dalam periode tertentu, skala indikatornya :

0 = Over Fishing, stok ikan menurun drastis

1 = Near Over Fishing, stok ikan mengalami tanda – tanda penurunan hasil tangkapan

2 = Full Fishing, stok relatif stabil

3 = Under Fishing, sumber daya melimpah, tapi penangkapan rendah

4 = Very Under Fishing, stok ikan melimpah, dan penangkapan rendah

Spesies ETP (*Endangered, Threatened, Proctected*) yang tertangkap

merupakan Jenis – jenis ikan dan biota laut yang dilindungi yang tidak disengaja ikut tertangkap dalam aktivitas penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dengan skala indikator :

0 = sangat sering

1 = sering

2 = kadang kadang

3 = jarang

4 = tidak pernah

Konservasi Lingkungan merupakan Upaya melindungi, menjaga, dan melestarikan sumberdaya alam dan fungsi ekosistem pesisir agar tetap lestari guna mendukung keberlanjutan kegiatan perikanan dan kesejahteraan masyarakat skala indikator :

0 = Tidak menjaga

1 = kurang menjaga

2 = cukup menjaga

3 = menjaga dengan baik

4 = sangat menjaga

Keberlanjutan Ekonomi pada Pengembangan Kawasan Minapolitan

adalah kemampuan kawasan untuk mempertahankan dan meningkatkan kegiatan ekonomi perikanan secara terus-menerus, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat tanpa mengorbankan sumber daya alam maupun lingkungan.

Keanekaragaman Komoditas Unggulan merupakan variasi jenis ikan yang didapatkan di kawasan minapolitan. Skala Indikator :

0 = < 1 variasi

1 = 2 variasi

2 = 3 – 5 variasi

3 = 5 – 8 variasi

4 = > 8 variasi

Penyerapan Tenaga Kerja menciptakan dan menyediakan peluang kerja baru bagi penduduk lokal pada sektor perikanan yang dilihat dari jumlah tenaga kerja yang terserap. Penyerapan kerja dapat diukur berdasarkan jumlah total tenaga kerja yang aktif dan terlibat dalam kegiatan ekonomi di kawasan minapolitan . Skala indikator

0 = sendiri

1 = 1 orang

2 = 2 orang

3 = 3 - 4 orang

4 = > 4 orang

Pendapatan Pelaku Usaha yaitu jumlah pendapatan nelayan yang diperoleh dari kegiatan melaut per nsatu bulan. Hal ini diukur dengan perhitungan rata-rata pendapatan bersih yang diterima oleh responden dari hasil usaha perikanan mereka. Skala Indikator :

0 = sangat rendah > 500.000

1 = rendah / 500.000

2 = sedang / < 500.000

3 = tinggi / 1.000.000

4 = sangat tinggi / > 1.000.000

Ketersediaan Modal merupakan kemampuan individu atau kelompok dalam menyediakan dana yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan perikanan. Ketersediaan modal diukur berdasarkan jenis sumber modal yang dapat diakses, Skala Indikator meliputi :

0 = modal pribadi

1 = pinjaman bunga tinggi (tengkulak atau rentenir)

2 = pinjaman bank

3 = pinjaman koperasi

4 = pinjaman BUMDES

Pemasaran Hasil Perikanan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan produk-produk perikanan dari produsen sampai ke tangan konsumen. Mencakup kegiatan promosi, distribusi, dan penjualan, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dan daya serap pasar. Di ukur berdasarkan saluran pemasaran, jangkauan pasar, efisiensi pemasaran skor indikator :

0 = pasar lokal desa/ kecamatan

1 = pasar lokal kabupaten

2 = pasar regional

3 = pasar nasional

4 = pasar ekspor

Harga Jual Ikan merupakan tingkat kesesuaian dan kestabilan harga hasil tangkapan yang diterima nelayan dalam kegiatan pemasaran perikanan tangkap.

Skala indikator :

0 = sangat rendah

1 = rendah

2 = sedang

3 = tinggi

4 = sangat tinggi

Keuntungan Usaha Perikanan merupakan tingkat keuntungan ekonomi yang diperoleh nelayan dari kegiatan perikanan tangkap setelah dikurangi biaya operasional usaha, skala indikator :

0 = sangat rugi

1 = rugi

2 = cukup

3 = untung

4 = sangat untung

Keberlanjutan Sosial pada Pengembangan Kawasan Minapolitan adalah kondisi dimana masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perikanan dapat menikmati hasil pembangunan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan, serta memiliki kualitas hidup, pengetahuan, dan kelembagaan sosial yang terus berkembang seiring waktu.

Tingkat Pendidikan Nelayan merupakan pendidikan formal terakhir yang dimiliki oleh nelayan. Tingkat pendidikan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan dasar dalam menerima informasi, mengadopsi teknologi baru, serta mengelola usaha secara profesional dengan skala indikator

0 = tidak tamat SD

1 = SD

2 = SMP

3 = SMA

4 = Perguruan Tinggi

Tingkat Frekuensi Konflik yaitu intensitas perselisihan atau pertentangan kepentingan yang terjadi antara berbagai kelompok pemangku kepentingan terkait pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan minapolitan. Konflik di ukur berdasarkan jumlah kejadian konflik yang tercatat dan tingkat keparahan yang dihasilkan oleh konflik tersebut. Skala indikator :

0 = sangat tinggi, terjadi > 5 kasus konflik yang melibatkan kerusuhan

- 1 = tinggi, terjadi 5 kasus konflik melibatkan aksi protes, kerusakan, dan proses hukum
- 2 = sedang, terjadi 3 – 4 kasus konflik yang memerlukan mediasi formal oleh pihak berwenang
- 3 = rendah, 1 – 2 kasus konflik, yang diselesaikan di tingkat desa
- 4 = sangat rendah, tidak ada kasus konflik tercatat atau ada kasus konflik namun diselesaikan dengan secara kekeluarga

Pemberdayaan Masyarakat Perikanan merupakan keterlibatan masyarakat khususnya kelompok pelaku usaha perikanan dalam seluruh tahapan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya perikanan di kawasan minapolitan, yang mencakup pelatihan, pengawasan, pertemuan kelompok dan musyawarah). Skor indikator :

- 0 = tidak sama sekali aktif
- 1 = tidak aktif
- 2 = cukup aktif
- 3 = aktif
- 4 = sangat aktif

Akses Masyarakat Terhadap Perikanan merupakan tingkat keterjangkauan masyarakat dalam mengakses kegiatan perikanan seperti : melaut, mendapatkan sarana/prasarana, informasi, dan peluang usaha dalam perikanan. Skala indikator :

- 0 = sangat terbatas,
- 1 = terbatas
- 2 = cukup terbatas
- 3 = tidak terbatas
- 4 = sangat tidak terbatas

Partisipasi Keluarga Dalam Usaha Perikanan yaitu keterlibatan anggota keluarga inti dalam usaha perikanan, baik sebagai penyedia tenaga kerja atau pengelola keuangan, dan pihak yang ikut dalam pengambilan keputusan

strategis usaha. Diukur berdasarkan jenis keterlibatan dan partisipasi. Skala indikator meliputi :

- 0 = tidak ada
- 1 = sedikit dari anggota keluarga
- 2 = sebagian kecil dari anggota keluarga
- 3 = sebagian besar dari anggota keluarga
- 4 = semua anggota keluarga

Keberlanjutan Teknologi dan Infrastruktur pada Pengembangan Kawasan

Minapolitan adalah kemampuan kawasan untuk mengembangkan, memanfaatkan, dan memelihara sarana, prasarana, serta teknologi perikanan secara efisien dan berkelanjutan, guna mendukung produktivitas dan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Pengolahan Produk Perikanan yaitu proses perubahan bahan baku perikanan menjadi produk bernilai tambah yang bertujuan untuk memperpanjang daya simpan, memenuhi standar mutu pasar, dan meningkatkan keuntungan dan pendapatan pada pelaku usaha. Hal ini diukur berdasarkan tingkat nilai tambah, penerapan teknologi pengolahan di kawasan minapolitan.

Skala indikator :

- 0 = tradisional, hanya melakukan pengolahan dasar, dengan nilai tambah yang rendah
- 1 = semi olahan yaitu adanya beberapa tahap pengolahan dasar dengan sentuhan teknologi dengan nilai tambah yang terbatas
- 2 = standar yaitu mampu menghasilkan produk olahan sekunder dengan menggunakan teknologi yang memadai
- 3 = modern yaitu adanya beragam produk olahan lanjutan yang menggunakan teknologi modern dan memiliki standar mutu tinggi
- 4 = menghasilkan produk olahan yang inovatif dengan menggunakan teknologi canggih dan memiliki sertifikasi mutu tradisional dan memiliki orientasi ekspor

Dukungan Sarana dan Prsarana Jalan yang Memadai merupakan ketersediaan dan kondisi aksesibilitas jaringan jalan yang menuju ke lokasi kegiatan perikanan dan menghubungkan lokasi produksi dengan pusat pengolahan atau pasar di kawasan minapolitan. Hal ini diukur berdasarkan kualitas fisik jalan, ketersediaan jaringan jalan, kapasitas jalan dan waktu tempuh aksesibilitas dll. Skala indikator :

0 = sangat tidak layak

1 = tidak layak

2 = cukup layak

3 = layak

4 = sangat layak

Dukungan Sarana dan Prasarana Perikanan merupakan ketersediaan fasilitas untuk mendukung aktivitas di sektor perikanan seperti : dermaga atau pelabuhan, tempat pelelangan ikan (TPI), unit pengolahan ikan (UPI), tempat pengolahan dan fasilitas cold storage. Skor indikator :

0 = sangat kurang memadai

1 = kurang memadai

2 = cukup memadai

3 = memadai

4 = sangat memadai

Dukungan Prasarana Pendukung Lainnya merupakan ketersediaan fasilitas pendukung untuk mempermudah kegiatan di sektor perikanan seperti : akses listrik yang stabil, jaringan air bersih, dan jaringan telekomunikasi dalam membantu kegiatan perikanan dan untuk kebutuhan masyarakat dengan skor indikator :

0 = sangat memadai

1 = kurang memadai

2 = cukup memadai

3 = memadai

4 = sangat memadai

Teknologi Penangkapan Ikan merupakan alat dan teknologi yang dipakai nelayan dalam kegiatan menangkap ikan seperti jenis alat tangkap, perahu atau kapal dan alat bantu seperti GPS dan lain lain. Skor Indikator

0 = sangat tradisional

1 = tradisional

2 = semi modern

3 = modern

4 = sangat modern

Keberlanjutan Kelembagaan pada Pengembangan Kawasan Minapolitan

adalah kemampuan lembaga-lembaga yang terlibat seperti : pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang dapat mengelola, mengatur, dan mengembangkan kegiatan perikanan secara efektif, partisipatif, dan berkesinambungan demi mendukung keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologi kawasan.

Keberadaan Kelompok Nelayan merupakan ketersediaan dan keberfungsian kelembagaan nelayan dalam mendukung kegiatan perikanan tangkap, baik dalam aspek produksi, pemasaran, maupun pengembangan usaha.

Skala indikator :

0 = tidak ada, tidak ada kelompok yang terorganisir

1 = pasif, kelompok ada dan sebagian formal tetapi jarang ada kegiatan formal hanya sebatas menampung bantuan pemerintah

2 = cukup aktif, mayoritas kelompok sudah formal, ada pertemuan rutin dan melakukan kegiatan kolektif

3 = aktif, sebagian besar kelompok formal dan aktif menyelenggarakan kegiatan

4 = sangat aktif, semua kelompok formal secara aktif menyelenggarakan kegiatan

Keikutsertaan dalam Kelompok Nelayan merupakan tingkat keterlibatan nelayan dalam aktivitas kelompok nelayan, baik sebagai anggota maupun dalam kegiatan organisasi yang mendukung usaha perikanan tangkap. Skala indikator

0 = tidak ada

1 = pasif, kelompok ada dan sebagian formal tetapi jarang ada kegiatan formal hanya sebatas menampung bantuan pemerintah

2 = cukup aktif, mayoritas kelompok sudah formal, ada pertemuan rutin dan melakukan kegiatan kolektif

3 = aktif, sebagian besar kelompok formal dan aktif menyelenggarakan kegiatan

4 = sangat aktif, semua kelompok formal secara aktif menyelenggarakan kegiatan

Keberadaan Lembaga Keuangan yaitu adanya institusi formal maupun informal yang bergerak di bidang jasa keuangan yang mudah dijangkau yang bertujuan untuk memobilisasi dana, menyediakan layanan simpan pinjam, dan memfasilitasi transaksi finansial bagi pelaku usaha perikanan. Skor indikator meliputi :

0 = sangat minim, lembaga keuangan formal seperti Bank sangat jauh hanya ada lembaga informal seperti tengkulak

1 = terbatas, terdapat BPR atau koperasi simpan pinjam lokal yang mudah dijangkau, tetapi sifatnya masih umum belum spesifik untuk kegiatan perikanan

2 = cukup memadai, terdapat akses bank dengan jarak yang wajar dan ada beberapa koperasi aktif dan produk pinjamannya sudah mulai disesuaikan untuk kebutuhan sektor perikanan

3 = memadai, lembaga keuangan Bank atau Koperasi mudah dijangkau dan aktif dalam penyaluran dana. Produk keuangannya seperti KUR atau asuransi

4 = sangat memadai, lembaga keuangan Bank dan Koperasi sangat amat mudah dalam penyaluran

Keberadaan Penyuluh dan Pelatihan merupakan ketersediaan dan pelaksanaan kegiatan penyuluhan serta pelatihan dalam mendukung pengembangan kapasitas nelayan pada sektor perikanan tangkap. Skor indikator

0 = sangat kurang, pelatihan hampir tidak ada, masyarakat tanpa pendampingan

1 = kurang memadai, adanya kunjungan rutin tapi terbatas. Pelatihan jarang 1 – 2 kali/tahun

2 = cukup memadai, pelatihan diadakan 3-4 kali/tahun

3 = memadai, adanya kunjungan intensif dan pelatihan diadakan secara reguler > 4 kali/tahun

4 = sangat memadai, adanya kunjungan intensif dan pelatihan diadakan secara rutin setiap bulannya

Keberadaan Pemberdaya Masyarakat Perikanan merupakan ketersediaan pendamping atau lembaga pemberdayaan yang membantu pengembangan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dalam sektor perikanan tangkap. Skala indikator

0 = tidak ada

1 = pasif

2 = cukup aktif

3 = aktif

4 = sangat aktif

Multidimensional scaling (MDS) merupakan metode analisis keberlanjutan yang menggambarkan skor dari indikator yang terdapat pada masing-masing kriteria/aspek keberlanjutan yang akan dianalisis.

Rapfish (*Rapid Appraisal for Fisheries*) merupakan alat analisis (*tools*) yang digunakan untuk mengukur tingkat keberlanjutan suatu sistem perikanan atau kawasan berbasis perikanan.

Kategori keberlanjutan berdasarkan nilai indeks hasil analisis MDS dibagi menjadi 4 kategori yaitu tidak berkelanjutan (00,00 – 25,00), Kurang Berkelanjutan (25,01 – 50,00), Cukup Berkelanjutan (50,01 – 75,00), berkelanjutan (75,01 – 100,00)

Variabel atau aspek yang digunakan sebagai penilaian keberlanjutan pemukiman yaitu sosial, ekonomi, lingkungan dan kelembagaan.

Indikator merupakan suatu acuan dalam mengukur kondisi permukiman berdasarkan kriteria yang ada.

Skor diskalakan antara kemungkinan terburuk “bad” hingga kemungkinan skor terbaik “good”. Skor diberikan pada skala nol hingga sepuluh, skor 10 (sepuluh) atau 0 (nol) mewakili skor ekstrem dari setiap indikator.

SWOT merupakan metode analisis mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang berpengaruh terhadap organisasi, wilayah, program dan kebijakan.

Kekuatan (*Strengths*) faktor internal yang menjadi keunggulan dan potensi positif dan dapat mendukung pencapaian tujuan

Kelemahan (*Weaknesses*) faktor internal yang menjadi keterbatasan, hambatan, dan ekkeruangan sehingga mengurangi pencapaian tujuan

Peluang (*Opportunities*) merupakan faktor eksternal yang memberikan kesempatan atau kondisi menguntungkan untuk mendukung pengembanagn dan pencapaian tujuan

Ancaman (*Threats*) merupakan faktor eksternal yang berpotensi menghambat, mengganggu, dan menimbulkan resiko terhadap pencapaian tujuan.

Setiap dimensi mencerminkan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan dalam jangka panjang. Sementara itu, variabel indikator digunakan untuk melihat kontribusi. Dengan demikian, struktur penelitian tetap fokus namun tetap mampu menangkap peran penting kelembagaan dalam mendukung pengembangan kawasan minapolitan.

Strategi adalah rencana yang disusun secara terintegrasi yang menghubungkan antara keunggulan strategis, dan tantangan lingkungan untuk mencapai suatu tujuan. Strategi Pengembangan adalah suatu rencana yang akan menentukan tindakan-tindakan yang akan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kerja serta kemampuan teknis dengan harapan tujuan akan tercapai dengan optimal.

Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal berupa Strengths dan Weakness dan faktor eksternal berupa Opportunities dan Threats yang mempengaruhi pengembangan wilayah. Analisis ini bertujuan untuk merumuskan strategi berdasarkan kondisi eksisting agar dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan ancaman.

Penelitian ini menilai keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan dengan mengacu pada lima dimensi keberlanjutan, yaitu: ekologi, ekonomi, sosial, teknologi - infrastruktur dan kelembagaan. Penilaian ini menilai keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan yaitu suatu sistem pembangunan perikanan berbasis wilayah untuk mempertahankan dan meningkatkan kapasitas dalam jangka panjang, yang mencakup dimensi ekonomi, ekologi, sosial, teknologi -infrastruktur, dan kelembagaan.

Penilaian ini akan diukur berdasarkan kuantitatif dengan pendekatan *Multidimensional Scaling (MDS)* dengan menggunakan perangkat Rapsfish. Setiap dimensi akan diwakili oleh indikator kunci yang sudah ditentukan yang akan dinilai oleh responden menggunakan skala ordinal dan skala likert hingga

mencapai hasil akhir yang dikategorikan menjadi beberapa tingkatan. Skala Ordinal merupakan kategori umum yang memiliki urutan seperti : pendidikan dasar, menengah, pasca-menengah dan skala Likert merupakan instrumen spesifik untuk mengukur tingkatan setuju atau tidak setuju, yang kemudian menjadi data ordinal.

3.2 Metode Pengumpulan Data, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Sumber Data

Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui survey dan observasi secara langsung di lokasi penelitian. Data primer juga diperoleh dengan cara membagikan kuisioner dan melakukan wawancara kepada pelaku kegiatan minapolita di Desa Ketapang, Desa Ruguk, Desa Sumur yang berlokasi di Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. Tujuan menggunakan data sekunder yaitu untuk menentukan skor dan atribut pada lima dimensi keberlanjutan seperti : ekologi, ekonomi, sosial, teknologi – infrastruktur, dan kelembagaan.

Data sekunder merupakan sebuah informasi yang diperoleh dengan melakukan studi literatur. Dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung studi literatur pada penelitian ini berasal dari instansi terkait seperti : Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lampung Selatan, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lampung Selatan, dan Dokumen RTRW Kabupaten Lampung Selatan dan pihak terkait lainnya.

3.2.2 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini sebagai berikut

1. Observasi Lapangan

Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung. Observasi lapangan dilakukan untuk memperoleh data yang lebih akurat sekaligus membandingkan atau mencocokkan data dari instansi terkait, berdasarkan data yang sebenarnya di lapangan. Data yang diambil melalui metode observasi seperti : data umum kondisi lokasi penelitian, data jumlah pembudidaya perikanan, pendapatan rata-rata nelayan, partisipasi masyarakat dalam kegiatan minapolitan, produksi perikanan dan dokumentasi di lapangan

2. Kuisisioner dan wawancara

Untuk mendapatkan data primer peneliti menggunakan teknik penyebaran kuisisioner. Kuisisioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan caramemberikan pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Pada pelaksanaan metode wawancara dilakukan kepada masyarakat.

Penilaian atau skoring untuk menganalisis status keberlanjutan menggunakan kuisisioner. Pakar menilai masing-masing indikator pada setiap kriteria keberlanjutan mengacu pada informasi yang telah diikhtisarkan dari hasil analisis masing-masing indikator.

3. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu cara pengumpulan data dengan menggunakan sumber-sumber dokumenter berupa literatur/referensi, laporan penelitian serupa, dan jurnal. Studi dokumen yang dilakukan untuk mengumpulkan data penelitian diperoleh dari lembaga atau instansi yang memiliki hak publikasi seperti Badan Pusat Statistik.

3.2.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Ketapang. Pemilihan lokasi penelitian akan dilakukan di tiga desa yang ada di Kecamatan Ketapang yang dapat mewakili kegiatan minapolitan di daerah tersebut yang ditetapkan sebagai

kawasan pengembangan kawasan minapolitan berdasarkan RTRW Kabupaten Lampung Selatan. Waktu penelitian dilakukan pada Bulan Desember 2025.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh nelayan aktif yang berada di kawasan minapolitan di tiga desa yang ada di Kecamatan Ketapang yaitu Desa Ketapang, Desa Ruguk, dan Desa Sumur. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2025 dan hasil verifikasi lapangan, jumlah populasi nelayan di ketiga desa sebanyak 533 orang. Informasi terkait populasi diperoleh dari data instansi terkait dan hasil identifikasi lapangan pada wilayah penelitian

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik tertentu dan digunakan untuk mewakili populasi dalam penelitian. Sampe yang dipilih harus mampu menggambarkan kondisi populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Kriteria responden yang dipilih yaitu :

1. Nelayan aktif yang telah melakukan kegiatan perikanan minimal 2-3 tahun
2. Berdomisili di wilayah penelitian
3. Bersedia menjadi responden

Menurut Arikunto (2009) pengambilan sampek dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan mempertimbangkan karakteristik populasi dan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini jumlah sampel ditetapkan sebanyak 33 responden yang dipilih secara *purposive* karena dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman yang relevan terkait kondisi pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang. Sebaran responden penelitian dilakukan di tiga desa yang termasuk ke dalam kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang.

Pembagian responden pada masing – masing desa disesuaikan dengan kondisi lapangan dan keterwakilan wilayah penelitian. Adapun sebaran responden penelitian dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Jumlah sebaran responden penelitian

No	Nama Desa	Jumlah Responden
1	Ketapang	16
2	Ruguk	7
3	Sumur	10
Total		33

3.4 Metode Analisis Data

Metode nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif menggunakan alat analisis sebagai berikut :

3.4.1 Metode Analisis untuk tujuan penelitian satu

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan satu pada penelitian ini dengan menggunakan analisis deskriptif . Analisis deskriptif dilakukan untuk menjelaskan kondisi eksisting pada kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan. Data yang dideskripsikan berasal dari hasil wawancara

3.4.2 Metode Analisis untuk tujuan dua dan tiga

Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan dua dan tiga pada penelitian ini dengan menggunakan Multi Dimensional Scalling (MDS). Pengolahan data dilakukan dengan bantuan Microsoft Excel dan tools dari Rappfish (Rapid Appraisal for Fisheries) untuk mempermudah dalam melakukan analisis data. Berikut analisis data yang digunakan dalam penelitian:

1. Menentukan Kriteria dan Indikator Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Minapolitan

Untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan menggunakan dimensi keberlanjutan (Sustainable Development) sebagai kriteria keberlanjutan yaitu : ekologi, ekonomi, sosial, teknologi – infrastruktur, dan kelembagaan. Berdasarkan tujuan SDGs, pengembangan kawasan minapolitan termasuk tujuan ke 14 yaitu : Kehidupan Air Di Bawah Laut artinya ; Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, samudra, dan ekosistem laut untuk pembangunan berkelanjutan.

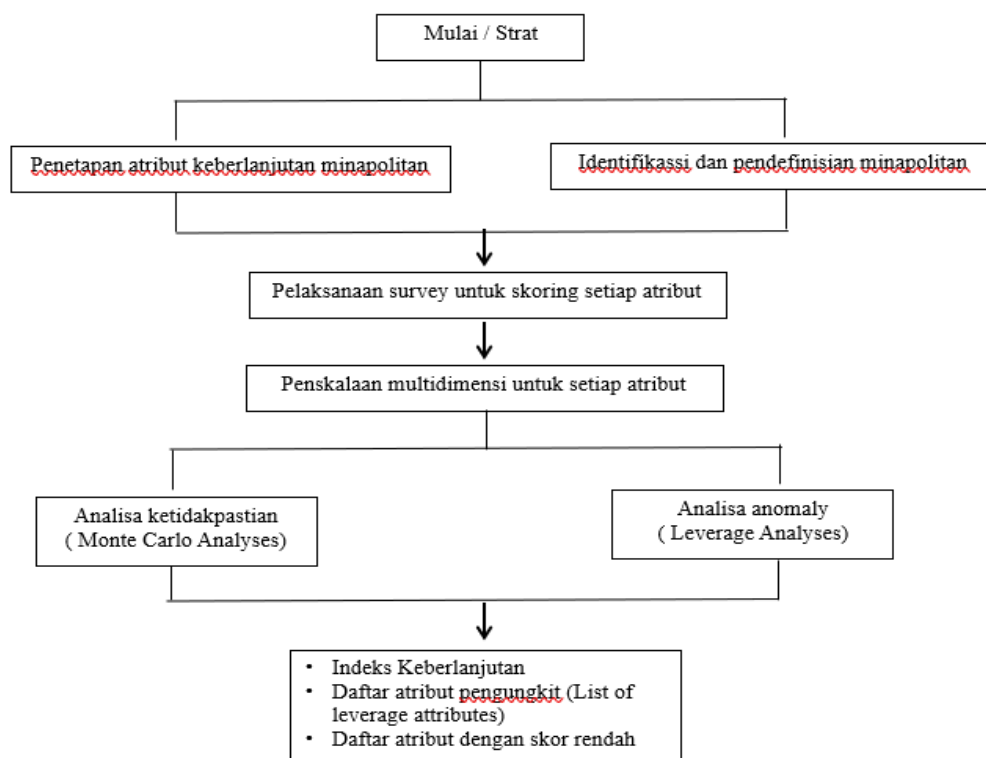
Indikator untuk mengukur keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan terdiri dari tiga puluh tujuh indikator dari lima dimensi keberlanjutan. Indikator diperoleh dari hasil studi dokumen pada penelitian terdahulu yang berpengaruh dan berkaitan dengan keberlanjutan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan

2. Menganalisis Status Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan

Status keberlanjutan dianalisis menggunakan analisis Multidimensional Scalling dengan tools RAPFISH (Rapid Appraisal for Fisheries). Rapfish didasarkan pada teknik ordinasasi dengan menempatkan sesuatu pada urutan atribut yang terukur dengan menggunakan Multidimensional Scaling (MDS). Secara rinci tahapan kegiatan dan analisis keberlanjutan dalam penelitian ini mencakup beberapa hal. Tahapan analisis rapfish sebagai berikut:

1. Melakukan penentuan atribut dalam penelitian ini, berdasarkan prosedur dan kriteria pemilihan atribut seperti yang dijelaskan dalam Kavangh (2001) . Ditetapkan 35 atribut yang mencakup lima dimensi yaitu : ekologi, ekonomi, sosial, teknologi – infrastruktur, dan kelembagaan (Suryawati, 2011)

2. Melakukan survey untuk mendapatkan skor bagi semua atribut yang terpilih dengan cara mengisi kuisioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dikaitkan dengan hasil skor yang sudah ditentukan dari setiap atribut
3. Melakukan analisis ordinasasi menggunakan Rapsfish dengan metode MDS dengan menggunakan Microsoft Excel
4. Menilai indeks dan status keberlanjutan program Minapolitan yang sudah dikaji secara multidimensi pada setiap dimensi
5. Melakukan analisa sensitivity analysis (*leverage analysis*) untuk menentukan perubahan yang sensitive yang mempengaruhi keberlanjutan.
6. Melakukan Monte Carlo untuk memperhitungkan aspek ketidakpastian.



Gambar 2 . Alur tahapan kegiatan untuk penentuan indeks Keberlanjutan Program Minapolitan (Suryawati, 2011)

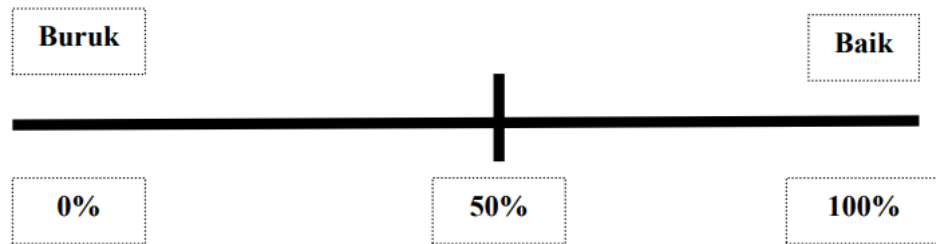
Nilai skor dari masing-masing atribut dianalisis secara multidimensional. Nilai skor yang baik ditunjukkan dengan nilai lebih kecil dari 0,25 atau $S < 0,25$ dan skala untuk indeks keberlanjutan sistem yang dikaji mempunyai rentang 0 – 100 %. Untuk menentukan satu atau beberapa titik yang mencerminkan posisi keberlanjutan yang dikaji relatif terhadap dua titik acuan yaitu titik baik (*good*) dan titik buruk (*bad*). Adapun nilai skor yang merupakan nilai indeks keberlanjutan setiap dimensi dalam metode analisis MDS dapat dilihat pada Tabel 3

Tabel 3. Kategori status keberlanjutan berdasarkan nilai indeks keberlanjutan

No	Nilai Indeks	Kategori	Keterangan
1	0,00 – 25,00	Buruk	Tidak berkelanjutan <i>Bad : Unsustainable</i>
2	25,01 – 50,00	Kurang	Kurang berkelanjutan <i>Insufficient : Less sustainable</i>
3	50,01 – 75,00	Cukup	Cukup berkelanjutan <i>Fair : Fairly Sustainable</i>
4	75,01 – 100,00	Baik	Sangat berkelanjutan <i>Good : Very Sustainable</i>

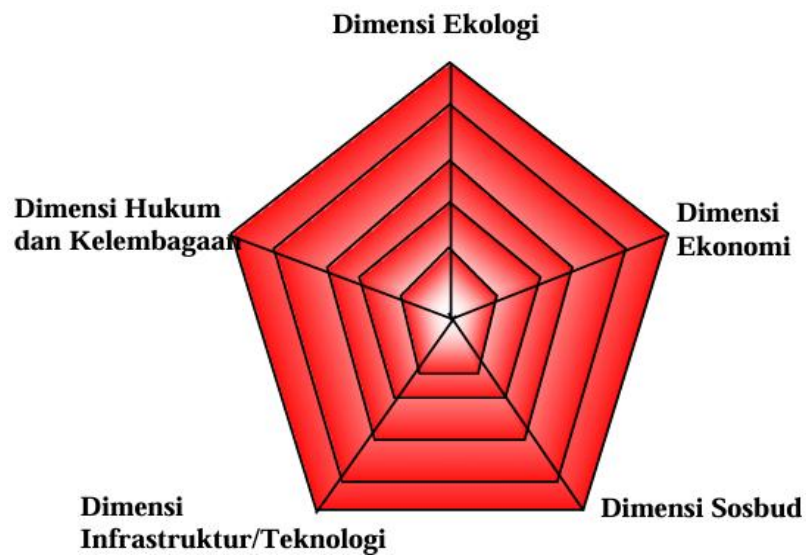
Sumber : (Suryawati, 2011 : dimodifikasi dari Susilo, 2003)

Menurut Susanto *dkk* (2012), Melalui metode MDS, maka posisi titik keberlanjutan dapat divisualisasikan melalui sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Dengan proses rotasi, maka posisi titik dapat divisualisasikan pada sumbu horizontal dengan nilai indeks keberlanjutan diberi nilai skor 0 % (buruk) dan 100 % (baik). Jika sistem yang dikaji mempunyai nilai indeks keberlanjutan lebih besar atau sama dengan 50 % ($> 50\%$), maka sistem dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) dan tidak berkelanjutan jika nilai indeks kurang dari 50 % ($< 50\%$). Ilustrasi hasil ordinasi nilai indeks keberlanjutan dapat dilihat pada Gambar 3:



Gambar 3. Ilustrasi indeks keberlanjutan
 Sumber : Susanto, *dkk* (2012)

Nilai indeks keberlanjutan pada setiap masing-masing dimensi dapat divisualisasikan dalam bentuk diagram layang-layang (*kite diagram*) seperti pada gambar 4



Gambar 4. Ilustrasi kite diagram indeks keberlanjutan setiap dimensi
 Sumber: Susanto, *dkk* (2012)

3.5 Analisis Monte Carlo

Menurut Kavanagh and Pitcher (2004) dalam Wibowo (2015) Analisis dengan metode Monte Carlo berguna untuk mempelajari (1) pengaruh kesalahan dalam skor atribut yang disebabkan oleh pemahaman kondisi sumberdaya, (2)

pengaruh variasi pemberian skor akibat perbedaan opini atau penilaian oleh penelitian yang berbeda, (3) Stabilitas proses analisis MDS yang berulang-ulang (iterasi) dan juga melihat kualitas stabilitas titik-titik acuan metode yang dilakukan; (3) kesalahan memasukan data atau data yang hilang; dan (4) Tingginya nilai stress hasil analisis .

Analisis Monte Carlo dilakukan pada selang kepercayaan 95%. Hasil analisis Monte Carlo kemudian dibandingkan dengan hasil analisis MDS. Hasil perbandingan ini jika perbedaannya kecil maka menunjukkan bahwa dampak dari kesalahan pemberian skor relatif kecil, dampak dari variasi beberapa pemberian skor terhadap atribut relatif kecil, penilaian dengan MDS yang berulang-ulang menjadi stabil, kesalahan data atau kehilangan data menjadi relatif kecil. Membandingkan hasil analisis Monte Carlo (MC) dan analisis MDS pada taraf kepercayaan 95% atau tingkat kesalahan 5% sehingga diperoleh bahwa selisih nilai kedua analisis tersebut lebih besar ($MC-MDS > 5\%$) atau lebih kecil ($MC-MDS < 5\%$). Jika nilai selisih kedua analisis ini $> 5\%$ maka hasil analisis MDS tidak memadai sebagai penduga nilai indeks keberlanjutan, dan jika nilai selisih kedua analisis tersebut. \

Ketepatan analisis MDS (*Goodness of fit*) ditentukan oleh nilai S-Stress yang dihasilkan dari perhitungan nilai S tersebut. Nilai stress rendah menunjukkan ketepatan yang tinggi (*Good of fit*), sementara nilai S tinggi menunjukkan sebaliknya. Selanjutnya dalam Rapfish, model yang baik ditunjukkan dengan nilai stress yang lebih kecil dari 0,25 dan sebaliknya jika nilai stress lebih tinggi dari 0,25 maka hasil MDS memiliki ketepatan yang rendah.

3.6 Analisis Leverage

Analisis leverage atau analisis sensitivitas adalah analisis yang bertujuan untuk menentukan atribut-atribut sensitif yang berpengaruh atau berperan sebagai faktor pengungkit status keberlanjutan. Faktor pengungkit merupakan atribut

yang keberadaannya berpengaruh sensitif terhadap peningkatan atau penurunan status keberlanjutan. Oleh karenanya, atribut-atribut sensitif ini perlu diberi perhatian secara khusus yang sehingga memungkinkan terjadinya peningkatan status dari sistem tersebut.

Analisis Leverage atau analisis sensitivitas digunakan untuk mengetahui efekstabilitas jika salah satu atribut dihilangkan saat dilakukannya ordinasi. Untuk sebanyak M atribut, maka analisis Leverage dilakukan M+1 kali penghitungan, yaitu 1 kali penghitungan terhadap seluruh atribut (M atribut) dan M kali terhadap salah satu atribut jika dihilangkan. Semakin besar nilai RMS maka semakin besar peranan atribut tersebut terhadap sensitivitas status keberlanjutan. Analisis Rapfish memungkinkan untuk menganalisis leverage (sensitivitas atribut terhadap nilai indeks keberlanjutan).

Pengaruh setiap atribut dilihat dalam bentuk perubahan root mean square (RMS), khususnya pada sumbu x terutama pada skala berkelanjutan sumberdaya dan perubahan sumbu y tidak diperhitungkan. Hal ini dikarenakan hanya untuk melihat perubahan RMS. Rumus RMS tersebut adalah Hasil analisis leverage akan menunjukkan persentase (%) perubahan *root mean square* masing-masing atribut jika dihilangkan dalam ordinasi. Atribut yang memiliki persentase tertinggi merupakan atribut yang paling sensitif/berpengaruh kuat terhadap keberlanjutan. Leverage dihitung berdasarkan standard error perbedaan antara skor dengan atribut dan skor yang diperoleh tanpa atribut (Wibowo, 2015)

Menentukan Strategi Keberlanjutan Pengembangan Minapolitan

1. Dilakukan analisis menggunakan MDS untuk mengetahui tingkat keberlanjutan pada setiap dimensi yaitu : dimensi ekologi, ekonomi, sosial, teknologi- infrastruktur, dan kelembagaan. Dimensi dengan nilai indeks keberlanjutan terendah akan menjadi fokus utama dalam perumusan strategi keberlanjutan

2. Dilakukan Analisis Monte Carlo untuk mengukur kestabilan dan keakuratan hasil MDS, sehingga nilai indeks yang dihasilkan dapat dipercaya dan dijadikan dasar dalam penyusunan strategi. Jika perbedaan nilai antara hasil MDS dan Monte Carlo kecil, maka hasil analisis dianggap stabil dan valid.
3. Dilakukan Analisis Lavarage untuk mengidentifikasi atribut-atribut yang paling sensitif, yang memiliki nilai RMS (Root Mean Square) tertinggi dalam setiap dimensi yang dianggap sebagai faktor penguangkit utama yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai keberlanjutan
4. Faktor-faktor tersebut kemudian disusun ke dalam matriks *Strengths* (Kekuatan), *Weaknesses* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), dan *Threats* (Ancaman) atau SWOT untuk merumuskan alternatif strategi pengembangan kawasan minapolitan tangkap yang berkelanjutan.
5. Hasil analisis SWOT selanjutnya digunakan untuk menentukan prioritas strategi kebijakan yang dapat mendukung peningkatan keberlanjutan kawasan minapolitan tangkap berdasarkan atribut sensitif pada masing-masing dimensi keberlanjutan.
6. Strategi yang dihasilkan kemudian dianalisis kembali menggunakan matriks IFAS (*Internal Factor Analysis Summary*) dan EFAS (*External Factor Analysis Summary*) untuk menentukan bobot, rating, serta posisi strategi pada kuadran SWOT sehingga diperoleh strategi prioritas dalam pengembangan kawasan minapolitan tangkap yang berkelanjutan.
7. Strategi difokuskan untuk memperbaiki aspek-aspek yang memiliki pengaruh besar terhadap peningkatan indeks keberlanjutan sehingga strategi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan secara berkelanjutan

IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Letak Geografis dan Administratif Kabupaten Lampung Selatan

Secara astronomis, wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak di antara $105^{\circ}14'$ - $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ - 6° Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lampung Selatan 2.227,379 km². Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan, 260 desa dan 50 pulau. Hal tersebut bisa dilihat secara rinci pada Tabel 4

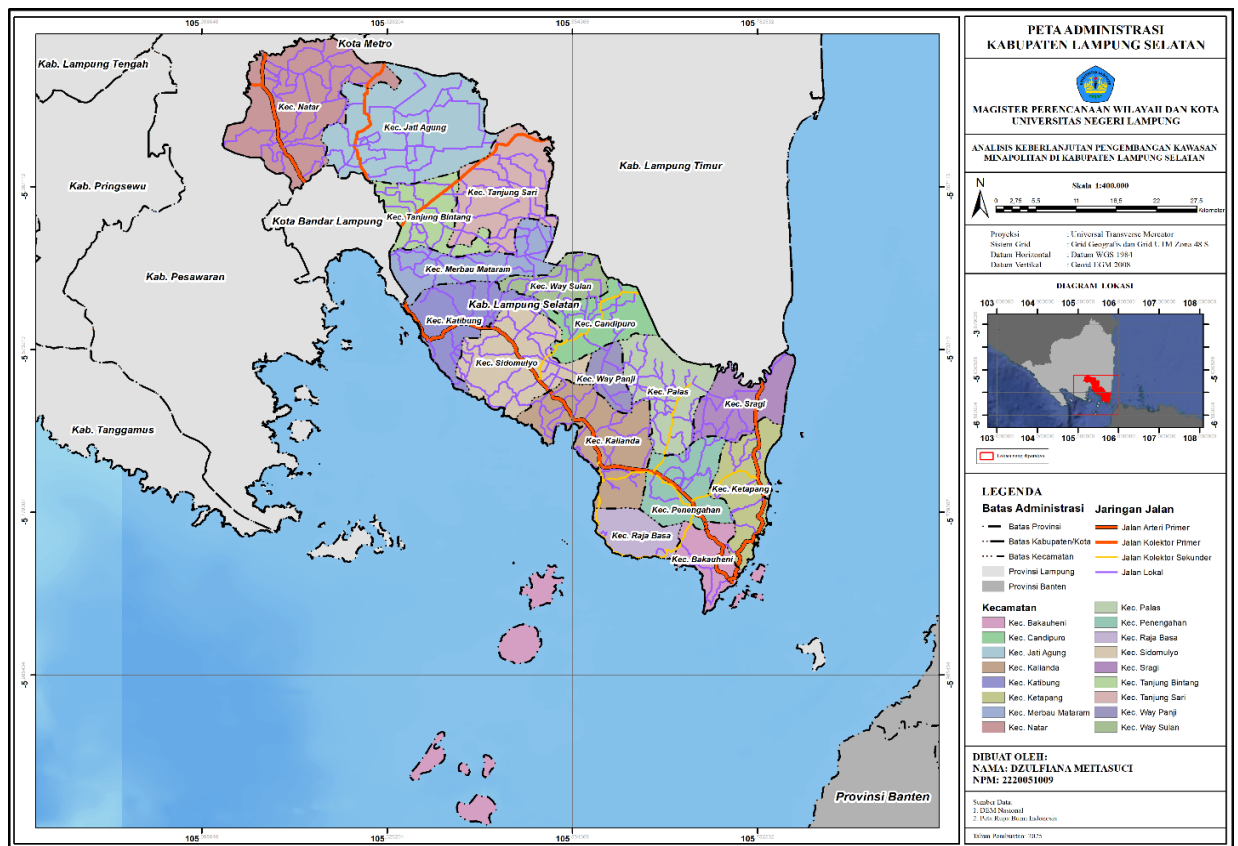
Tabel 4. Luas wilayah, jumlah pulau dan jumlah desa

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (m)	Jumlah Pulau	Jumlah Desa	
				Tepi Laut	Bukan Tepi Laut
1	Natar	261,075	-	-	26
2	Jati Agung	250,182	-	-	21
3	Tanjung Bintang	165,945	-	-	16
4	Tanjung Sari	96,291	-	-	8
5	Katibung	161,975	3	3	9
6	Merbau Mataram	130,089	-	-	15
7	Way Sulan	46,767	-	-	8
8	Sidomulyo	132,743	-	1	15
9	Candipuro	122,260	-	-	14
10	Way Panji	36,746	-	-	4
11	Kalianda	175,998	-	9	20
12	Rajabasa	120,956	24	13	3
13	Palas	128,262	-	-	21
14	Sragi	87,823	-	1	9
15	Penengahan	106,305	-	-	22
16	Ketapang	143,456	11	8	9
17	Bakauheni	60,146	12	3	2
Lampung Selatan		2.227,379	50	38	222

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2026

Secara administratif wilayah Kabupaten Selatan berbatasan dengan kabupaten/kota lain dan wilayah perairan yang berpengaruh terhadap karakteristik wilayah, khususnya pada kawasan pesisir. Batas wilayah administratif Kabupaten Lampung Selatan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Pesawaran
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa



Gambar 5. Peta administrasi Kabupaten Lampung Selatan
Sumber : RTRW Kabupaten Lampung Selatan, 2025

4.2 Kondisi Demografi Kabupaten Lampung Selatan

Jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 berjumlah 1.146.074 jiwa. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 582.291 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 563.783. Sex ratio di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2025 sebanyak 103,28 atau 103 persen (%) artinya jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding jumlah penduduk perempuan.

Berdasarkan data kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Lampung Selatan 571 jiwa/km², kondisi ini menunjukkan bahwa persebaran penduduk di Kabupaten Lampung Selatan tidak merata di mana konsentrasi penduduk cenderung terpusat pada kecamatan-kecamatan tertentu yang memiliki aksesibilitas dan perkembangan wilayah yang lebih tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Natar dengan jumlah penduduk sebanyak 972 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan kepadatan terendah terletak di Kecamatan Rajabasa sebanyak 262 jiwa/km² yang tertera pada Tabel 4

Tabel 4 Kependudukan Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk	Presentase Penduduk	Kepadatan Penduduk	Rasio Jenis Kelamin
1	Natar	207.717	18,12	972	103,01
2	Jati Agung	132.897	11,60	808	103,69
3	Tanjung Bintang	91.447	7,89	705	102,67
4	Tanjung Sari	35.301	3,08	342	103,48
5	Katibung	77.809	6,79	443	104,05
6	Merbau Mataram	61.661	5,38	541	103,50
7	Way Sulan	26.557	2,32	571	106,12
8	Sidomulyo	70.789	6,18	578	103,77
9	Candipuro	62.170	5,42	734	103,47
10	Way Panji	19.392	1,69	504	100,31
11	Kalianda	101.919	8,89	631	102,90
12	Rajabasa	26.303	2,30	262	106,78
13	Palas	65.357	5,70	381	101,92
14	Sragi	37.919	3,31	463	102,02
15	Penengahan	45.640	3,98	343	104,77
16	Ketapang	57.180	4,99	527	103,06
17	Bakauheni	25.998	2,27	455	101,35
Lampung Selatan		1.146074	100,00	571	103,28

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2026

4.3 Kondisi Fisik Kabupaten Lampung Selatan

Secara morfologi Kabupaten Lampung Selatan memiliki garis pantai sepanjang kurang lebih 180 km dengan karakteristik perairan laut yang khas. Sebagian besar lahan digunakan untuk pertanian, perkebunan, dan kawasan perikanan budidaya atau tambak.

Secara topografi karakteristik wilayah di Kabupaten Selatan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu :

- a. Pesisir dan Dataran Rendah : wilayah ini relatif datar yang terletak di sepanjang pesisir pantai. Daerah ini umumnya dimanfaatkan sebagai daerah pemukiman, pelabuhan dan tambak
- b. Perbukitan dan Pegunungan : sebagian wilayah dataran yang terdiri dari perbukitan dan pegunungan, khususnya di wilayah Kecamatan Rajabasa
- c. Kepulauan : wilayah ini mencakup beberapa pulau

Pulau-pulau yang ada di Kabupaten Lampung Selatan tersebar di beberapa kecamatan di antara lain : Pulau Krakatau, Pulau Sebesi, Pulau Sebu, Pulau Rakata Tua, Pulau Legundi, Pulau Siuncal, Pulau Rimau, dan Pulau Kandang. Pulau-pulau tersebut terletak di empat kecamatan, yaitu : Kecamatan Katibung, Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang, dan Kecamatan Bakauheni. Kecamatan Rajabasa memiliki jumlah pulau paling banyak yaitu 24 pulau, salah satunya yaitu Pulau Sebesi yang merupakan Pulau terluas di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas 4.643 Hektare (Ha).

Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa daratan dengan ketinggian yang bervariasi. Wilayah dengan ketinggian tertinggi terletak di Kecamatan Bakauheni dengan ketinggian 157 mdpl. Kabupaten Kalianda memiliki ketinggian 16 mdpl. Dilihat dari kondisi fisik wilayah, Kabupaten Selatan memiliki potensi pengembangan wilayah yang cukup besar, khususnya untuk sektor kelautan, perikanan dan pariwisata yang tertera pada Tabel 5

Tabel 5. Tinggi wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Kecamatan	Tinggi Wilayah (mdpl)
1	Natar	107
2	Jati Agung	75
3	Tanjung Bintang	97
4	Tanjung Sari	54
5	Katibung	112
6	Merbau Mataram	107
7	Way Sulan	35
8	Sidomulyo	39
9	Candipuro	25
10	Way Panji	24
11	Kalianda	16
12	Rajabasa	33
13	Palas	22
14	Sragi	4
15	Penengahan	97
16	Ketapang	20
17	Bakauheni	157

Sumber : BPS Kabupaten Selatan, 2026

Kondisi iklim di Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh angin muson yang terjadi akibat perbedaan tekanan udara antara Benua Asia dan Benua Australia. Perbedaan tekanan dipicu oleh perubahan pemanasan permukaan bumi yang terjadi secara periodik pada bulan Januari dan bulan Juli, fenomena ini disebut angin Muson. Akibat pengaruh angin muson, wilayah Lampung Selatan memiliki karakteristik unik, dampak angin muson menyebabkan musim peralihan antara musim kemarau dan musim hujan tidak begitu terasa .

Perairan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dipengaruhi oleh arus laut Selat Sunda yang bersifat dinamis dan gelombang yang bervariasi, di mana pola arus laut dan ketinggian gelombang sangat dipengaruhi oleh interaksi antar massa air di Samudera Hindia, Laut Jawa dan Angin Musiman (Muson). Angin musim Barat (hujan) terjadi di bulan Oktober hingga bulan April yang ditandai dengan angin yang lebih kencang dan gelombang tinggi, hal tersebut mengakibatkan aktivitas nelayan menjadi terbatas dan meningkatkan resiko kecelakaan di laut. Pada saat angin musim Timur (kemarau) yang terjadi di

bulan April hingga Oktober, kondisi perairan cenderung lebih tenang sehingga aktivitas nelayan dapat berlangsung lebih optimal.

4.4 Kondisi Pesisir dan Potensi Sumber Daya Perikanan

Kondisi Pesisir Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Lampung yang memiliki garis pantai yang cukup panjang dan berbatasan langsung dengan perairan Selat Sunda. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Lampung Selatan memiliki karakteristik wilayah pesisir yang memiliki potensi sumber daya kelautan yang potensial. Keberadaan ekosistem pada kawasan pesisir Kabupaten Lampung Selatan memiliki keanekaragaman sumber daya alam seperti perairan produktif yang menjadi habitat bagi berbagai jenis ikan dan biota laut. Ekosistem ini berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan pesisir dan mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, terutama pada sektor perikanan tangkap dan budidaya.

Potensi sumber daya perikanan di wilayah ini tergolong cukup tinggi seperti : perikanan tangkap dan perikanan budidaya, didukung dengan kegiatan pengolahan hasil perikanan dan perdagangan. Kawasan pesisir Kabupaten Lampung selatan memiliki peranan penting dalam pengembangan pada kegiatan sektor perikanan yang mendukung aktivitas ekonomi berbasis kelautan. Kondisi tersebut memerlukan adanya pengelolaan yang berkelanjutan agar pemanfaatan potensi dapat dilakukan secara optimal dan tidak mengabaikan kelestarian lingkungan. Tahun 2025 jumlah rumah tangga perikanan tangkap di Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 759 rumah tangga yang bergerak dibidang sub-sektor perikanan laut. Jumlah produksi perikanan tangkap tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 0,99 persen (%) menjadi 32.708 ton menjadi 33.034 ton. Jenis ikan yang paling banyak dihasilkan pada tahun 2025 adalah udang Vannamee sebanyak 12,89 ribu ton dan ikan lele sebanyak 6,89 ribu ton. Potensi sumber daya perikanan bisa dilihat pada Tabel 6 :

Tabel 6. Potensi sumber daya perikanan Kabupaten Lampung Selatan

No	Nama Kecamatan	Perairan Laut		Perairan Umum		Produksi Perikanan	
		RTP	Nelayan	RTP	Nelayan	Perairan Luat	Perairan Umum
1	Natar	-	-	-	-	-	-
2	Jati Agung	-	-	-	-	-	-
3	Tanjung Bintang	-	-	-	-	-	-
4	Tanjung Sari	-	-	-	-	-	-
5	Katibung	124	294	-	-	1.103,70	-
6	Merbau Mataram	-	-	-	-	-	-
7	Way Sulan	-	-	-	-	-	-
8	Sidomulyo	69	130	-	-	4.455,21	-
9	Candipuro	-	-	-	-	-	-
10	Way Panji	-	-	-	-	-	-
11	Kalianda	110	360	-	-	5.132,58	-
12	Rajabasa	115	700	-	-	7.110,20	-
13	Palas	-	-	-	-	-	-
14	Sragi	98	254	-	-	4.067,55	-
15	Penengahan	-	-	-	-	-	-
16	Ketapang	165	516	-	-	7.001,27	-
17	Bakauheni	66	202	-	-	4.163,01	-
Lampung Selatan		759	2.456	-	-	33.033,52	-

Keterangan : RTP (Rumah Tangga Perikanan)

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2026

Produksi perikanan di Kabupaten Lampung Selatan berasal dari kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya yang tersebar pada berbagai media usaha perikanan. Perkembangan produksi tersebut dapat menggambarkan kondisi sektor perikanan serta kontribusinya terhadap aktivitas ekonomi perikanan daerah. Data jumlah produksi perikanan berdasarkan tempat penangkapan dan budidaya ikan selama tahun 2021–2025 disajikan pada Tabel

Tabel 7. Total produksi perikanan berdasarkan tempat penangkapan ikan

No	Tempat Penangkapan Ikan	2021 (ton)	2022 (ton)	2023 (ton)	2024 (ton)	2025 (ton)
Penangkapan / Capture Fishery						
A	1 Laut/Marine	1.790	2.140	2.140	660	759
	Perairan Umum	-	-	-	-	-
	2 a. Sungai	-	-	-	-	-
	b. Rawa	-	-	-	-	-
	c. Waduk	-	-	-	-	-
Budidaya / Aquaculture Fishery						
B	1 Laut	300	156	151	151	162
	2 Tambak	1.104	1.104	1.392	1.392	1.106
	3 Kolam	3.690	3.694	3.688	3.490	3.963
	4 Minapadi	-	-	-	-	-
	5 Keramba Jaring Apung	41	31	31	3	40
	6 Keramba Bambu	-	-	-	-	-
Total		6.925	7.125	7.402	5.696	6.030

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan, 2026

Berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa perkembangan jumlah produksi perikanan berdasarkan tempat penangkapan ikan di Kabupaten Lampung Selatan selama periode tahun 2021–2025. Data tersebut menggambarkan kontribusi sektor perikanan tangkap dan budidaya terhadap total produksi perikanan, sehingga dapat digunakan untuk melihat kecenderungan perubahan produksi pada masing-masing jenis usaha perikanan dari tahun ke tahun

4.5 Letak Geografis dan Administratif Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Ketapang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan dengan luas wilayah 143,46 km². Kecamatan Ketapang terdiri dari 17 desa, 92 dusun dan 291 rukun tetangga (RT). Desa Ruguk merupakan desa terluas dengan luas wilayah 19,20 km² atau 13,38 persen (%) dari total luas wilayah di Kecamatan Ketapang. Ibu Kota Kecamatan Ketapang terletak di Desa Bangun Rejo. Berdasarkan jarak, Desa Sidoluhur merupakan desa dengan jarak paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan yaitu

sejauh 21 kilometer (km). Desa dengan jarak paling dekat dengan Ibu Kota Kecamatan adalah Desa Sripendowo yaitu 3 kilometer (km). Secara administratif Kecamatan Ketapang berbatasan dengan kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan yaitu :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Sragi
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bakauheni dan Selat Sunda
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Penengahan
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Secara tipologi wilayah Kecamatan Ketapang didominasi oleh kawasan pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan Selat Sunda. Kondisi tersebut membentuk karakteristik wilayah pesisir yang kuat, sehingga Kecamatan Ketapang memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan dan aktivitas ekonomi pada sektor kelautan dan perikanan. Dengan karakteristik tersebut Kecamatan Ketapang memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan dengan memanfaatkan sumber daya perikanan.

4.6 Kondisi Demografi Kecamatan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan

Total jumlah penduduk di Kecamatan Ketapang berdasarkan jenis kelamin sebanyak 56.358 jiwa yang terdiri dari 28.677 penduduk laki-laki dan 27.681 penduduk perempuan. Desa Ketapang merupakan desa dengan penduduk terbanyak yaitu sebanyak 6.537 jiwa atau sekitar 11,60% dari total penduduk di Kecamatan Ketapang. Sebaran jumlah penduduk di Kecamatan Ketapang bervariasi pada setiap desa. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak ada di Desa Ketapang, Desa Ruguk dan Desa Sumur. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas permukiman dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat lebih banyak terpusat pada desa desa tersebut dibandingkan desa lainnya di Kecamatan Ketapang. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada setiap desa di Kecamatan Kerapang dapat dilihat pada Tabel 8

Tabel 8. Penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Ketapang

No	Desa	Penduduk		Jumlah
		Laki - laki	Perempuan	
1	Sumur	3.408	2.914	5.962
2	Ruguk	3.264	3.069	6.333
3	Tri Dharma Yoga	762	731	1.493
4	Legundi	1.712	1.659	3.371
5	Ketapang	3.303	3.234	6.537
6	Bangunrejo	1.487	1.529	3.016
7	Karang Sari	2.220	2.104	4.324
8	Sripendowo	1.740	1.666	3.406
9	Sumber Nadi	643	613	1.256
10	Taman Sari	1.687	1.607	3.294
11	Kemukus	1.082	1.118	2.200
12	Lebung Nala	773	754	1.527
13	Sidoasih	1.343	1.320	2.663
14	Pematang Pasir	2.350	2.215	4.565
15	Berundung	1.409	1.348	2.757
16	Sidoluhur	881	827	1.708
17	Wai Sidomukti	973	973	1.946
Kecamatan Ketapang		28.677	27.681	56.358

Sumber : BPS Kecamatan Ketapang 2025

Berdasarkan kondisi geografis, demografi, serta potensi sumber daya perikanan yang dimiliki, Kecamatan Ketapang memiliki peran penting sebagai kawasan minapolitan di Kabupaten Lampung Selatan. Potensi sumber daya perikanan yang cukup besar didukung oleh keberadaan wilayah pesisir, aktivitas perikanan tangkap, serta sarana dan prasarana perikanan yang menjadi penunjang kegiatan ekonomi masyarakat. Pengembangan kawasan minapolitan tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya perikanan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain yang berkaitan dengan aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi dan infrastruktur, serta kelembagaan. Diperlukan analisis terhadap kondisi eksisting kawasan untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang mempengaruhi pengembangan kawasan minapolitan sebagai dasar dalam mengevaluasi tingkat keberlanjutan dan merumuskan strategi pengembangan kawasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan yakni sebagai berikut :

1. Kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap yang cukup besar dan didukung oleh keberagaman komoditas perikanan, lokasi penangkapan ikan yang beragam, serta tersedianya saluran pemasaran hasil perikanan. Tetapi pengembangan kawasan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya pendapatan pelaku usaha perikanan, keterbatasan akses permodalan, minimnya pengolahan hasil perikanan, rendahnya kapasitas sumber daya manusia, serta kelembagaan perikanan yang belum optimal.
2. Pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Ketapang secara umum masih berada pada kategori kurang berkelanjutan. Dimensi teknologi dan infrastruktur termasuk kategori cukup berkelanjutan, sedangkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan termasuk kategori kurang berkelanjutan. Faktor-faktor sensitif yang mempengaruhi keberlanjutan kawasan meliputi tingkat eksploitasi sumber daya ikan, tren hasil tangkapan, lokasi penangkapan ikan, akses permodalan, teknologi penangkapan, serta keberadaan kelompok nelayan
3. Kawasan minapolitan di Kecamatan memiliki kekuatan internal dan peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengembangan kawasan. Strategi yang direkomendasikan meliputi pengembangan komoditas unggulan perikanan sebagai penggerak ekonomi kawasan,

penguatan sistem pemasaran dan akses pasar hasil perikanan, peningkatan sarana dan prasarana pendukung kawasan minapolitan, pengelolaan sumber daya perikanan, ekosistem pesisir secara berkelanjutan, dan penguatan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelembagaan pendukung kawasan. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan kawasan minapolitan dari aspek ekonomi, sosial, ekologi, teknologi dan infrastruktur, serta kelembagaan.

6.2 Saran Untuk Peneliti Selanjutnya

- a. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian keberlanjutan kawasan minapolitan dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau melakukan perbandingan antar kawasan minapolitan.
- b. Penelitian berikutnya dapat menambahkan pendekatan analisis lain seperti AHP, dan QSPM agar rekomendasi strategi yang dihasilkan menjadi lebih spesifik dan prioritas kebijakan lebih jelas.
- c. Penelitian selanjutnya disarankan menambah indikator keberlanjutan, seperti aspek perubahan iklim, ekonomi biru (blue economy), ketahanan pesisir, atau tata kelola wilayah pesisir.
- d. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait evaluasi implementasi strategi pengembangan kawasan minapolitan, sehingga dapat diketahui efektivitas kebijakan dalam meningkatkan keberlanjutan kawasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, T.C., Hassanuddin, S., dan Alfiah, R. (2023). Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Kecamatan Puger. *Jurnal Penataan Ruang*, 18(2)
- Al Mukarim, F., Irsyadi S., dan Siti, F. (2021). Pengembangan Kawasan Mianapolitan Berkelanjutan Di Desa Watoboku, Kecamatan Solor Timur Kabupaten Flores Timur. *Jurnal Plano Madani*, 10(1), 66-75.
- Amri, Khairul., Djisman Manurung., Vincentius P. Siregar. (2007). Dinamika Kondisi Oseanografi Musiman Perairan Selat Sunda Dari Analisis Data Multitempora. *Jurnal Lit. Perikanan Ind.* 13(3), 191-199
- Cahya, D.L., Muhamad, D. M. (2020). Konsep Pengembangan Kawasan Minapolitan Ketapang Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Planesa*, 4(2)
- Darajati, Muhammad. Rafi. (2024). Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*. 14(1), 15-22
- Dewi, D.I. (2018). Potensi Pengembangan Kawasan Minapolitan Berbasis Perikanan Budidaya Di Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara. *Skripsi*. Univeristas Muhammadiyah Purwokerto
- Ermawati, M. (2020). Analisis Kesesuaian Lahan Budidaya Ikan dalam Mendukung Pengembangan Minapolitan Kawasan Pesisir Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(3), 915-918
- El Kifaf, A., Narni, F., dan Triana, G.D. (2023). Keberlanjutan Usaha Tambak Bandeng Melalui Pendekatan Multi-Dimension Scalling. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 12(1)
- Fauziyah, A.F., Wawagita, P.W., Turniningtyas, A. (2024). Tingkat Keberlanjutan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Di Pesisir Kabupaten Lamongan. *Journal Planning for Urban Region and Environment*, 13(4).
- Gumelar, S.A., Zainal, A., dan Henky, M. (2024). Strategi Pengembangan Kawasan Agroekonomi Minapolitan di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Jurnal ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh*, 11(3), 1509-1520
- Hapsoro, N., Kresensia, B. (2020). Perkembangan Pembangunan Berkelanjutan

- Dilihat Dari Aspek Ekonomi Di Indonesia. *Jurnal Arsitektur*, 3(2)
- Heirina, A., Ayub. (2023). Inkusifitas Sektor Perikanan Dalam Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Sumatera Selatan. *Journal Perikanan*. 13(2), 613-620
- Karepsiana, M., James, A., dan Yoisy, L. (2019). Status Keberlanjutan dan Strategi Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Papalele*, 3(2)
- Karlina., S.U.I., Rd, A, B. (2021). Kolaborasi Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Perikanan Tangkap Desa Karangsong. *Jurnal Administarsi Negara*, 12(2).
- Katti, S., Bakri., Eliyanti, A., dan Mokodompit. (2025). Persepsi Masyarakat Lokal Terhadap Pengembangan Potensi Wilayah Pesisir untuk Meningkatkan Ekonomi. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora*, 7(1)
- Khoiriyah, A.Z. (2024). implementasi Ekonomi Biru di Indonesia. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, 8 (2)
- Kultsum, F. (2023). Implementasi Asas Berkelanjutan Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten/ Kota di Indonesia. *Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 3(1)
- Lahay, Almira, Fardani., Piutu Cinthia Delis., Rachmad Caesario. (2023). Upaya Peningkatan Kualitas Ekosistem Wilayah Pesisir dan Laut Desa Way Lubuk Kecamatan Provinsi Lampung. *Jurnal Pengabdian Fakultas Pertanian Universitas Lampung*. 2(1), 228-234
- Mokoginta, D. C., Roosje J. P., Ricky M.S.L. (2021). Ketersediaan Sarana Prasarana dan Kreteria Khusus Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Spasial*, 8 (1), 2442-3262
- Pertiwi, N. (2017). Implementasi Sustainable Development di Indonesia. *Pustaka Ramadhan*. Purwakarta
- Pramudya, Kevin., Almadian Puspita Dewi., Nanda Luthfi Yani., Alvia Cahya Damar., Hilman Amri., Shahibah Yuliani. (2025). Pemanfaatan Potensi Pesisir Melalui Ekonomi Biru Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Pesisir Sabang & Jayapura. *Journal of Innovative and Creativity*. 5(2), 10094-10100
- Putriani, Dian. (2017). Analisis SWOT Sebagai Dasar Perumusan Strategi Bersaing Pada Produk Asuransi Jiwa Perorangan AJB Bumiputera 1912 KPR Pekanbaru. *JOM Fisip*. 4(1)
- Puspita, N.P.R., Ernan, R., dan Lala, M.K. (2025). Evaluation and Development Strategy of The Minapolitan Area in Pasair Sakti Sub – District, Lampung Timur Regency. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 9 (1), 59-71

- Ridwan, M., Andi, M.I. (2024). Pengembangan Kawasan Minapolitan Sebagai Daya Tarik Wisata Minat Khusus di Kabupaten Serdang bagai Sumatera Utara. *Jurnal Arsitektur Kota dan Pemukiman*, 9(2)
- Safitri, Zianah., Wendi El., Viona Paskreyanti Sitorus., Indah Noviyanti. (2024). Analisis SWOT terhadap Pengembangan Strategi Bisnis Pada Warung Makan Asyik Desa Balunijuk. *Jurnal Munahara*. 2(3), 140-153
- Sari, C.D., Rifki, K. (2023). Pengaruh Sektor Perikanan Terhadap PDB Indonesia. *PJEB : Perwira Journal of Economy & Business*. 3 (1).
- Suprianto, D., Irzal, E., dan Tatag, B., et al. (2022). Evaluasi Kapasitas Sumber Daya Manusia, Kelembagaan dan Pemasaran di Kawasan Minapolitan Kabupaten Merangin Provinsi Jambi. *Aquatic Sciences Journal*, 10(1)
- Susanto, H., Alatas, A., & Vervila, C. W. (2021). Analisis Potensi Dan Strategi Pengembangan Sapi Lokal Dengan Pola Integrasi Sawit-Sapi Di Kabupaten Kuantan Singingi. *Media Bina Ilmiah*, 15(7), 4821–4834.
- Suryawati, S.H., Agus, H.P. (2011). Analisis Ex – Ante Keberlanjutan Program Minapolitan. *Jurnal Sosek KP*. 6(1).
- Tasni, N., Irsyadi, S., dan Fadhil, S. (2021). Evaluasi Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bulukumba. *Journal of Urban and Regional Planning*, 2(2)
- Warlina, L. (2017). Manajemen Pembangunan dan Lingkungan. Universitas Terbuka. Tangerang.
- Wibowo, Arif. B., Sutrisno, A., dan Bambang, Y. (2021). Status Keberlanjutan Dimensi Ekologi Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Berkelanjutan Berbasis Perikanan Budidaya Air Tawar di Kabupaten Magelang. *Jurnal Saintek Perikanan*, 10(2).
- Wibowo, Y., Nita, K, dan Qurrotun, A. (2020). Analisis Kelayakan Pengembangan Kawasan Minapolitan yang Berkelanjutan Di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Teknologi Industri Pertanian*, 15(1)
- Wulandari, M.C. (2021). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal Berkelanjutan Pada Kawasan Minapolitan. *Journal OF Economics*, 1(2), 158-177
- Yaqin, Anfal., Ainul. (2021). Analisis SWOT Dalam Strategi Pengembangan Usaha Kerupuk Rumahan di UD. Sumber Abadi Tanggulangin. *Journal Of Industrial And System Optimization*, 4(2), 81-87